



APRIL STAKEHOLDER FORUM: PROSES PERBAIKAN FSC LAPORAN KEGIATAN

19-20 Juni 2024,
IPB Convention Center, Bogor, Indonesia

Diselenggarakan oleh

APRIL Group

Bekerja sama dengan

FSC International, WWF Indonesia dan Forest Peoples Programme

Daftar Isi

Rangkuman APRIL Stakeholder Forum - Proses Perbaikan FSC	2
Gambaran Umum Forum	5
Proses Perbaikan FSC	8
Status Proses Perbaikan yang Dilakukan oleh APRIL Group	10
Tantangan dan Peluang yang Disoroti oleh Peserta	13
Refleksi Penutup dari APRIL, FSC, FPP dan WWF-Indonesia	20
Lampiran	23
Catatan Kelompok Perbaikan Sosial	23
Laporan Kelompok <i>Breakout</i>	26

Rangkuman APRIL Stakeholder Forum: Proses Perbaikan FSC

APRIL Stakeholder Forum yang diadakan di Bogor, Indonesia, pada 19-20 Juni 2024 dirancang untuk mendukung dialog yang terbuka dan konstruktif antara para pemangku kepentingan mengenai proses perbaikan yang dijalankan APRIL untuk bergabung kembali (reasosiasi) dengan FSC. APRIL merupakan perusahaan pertama di dunia yang menerapkan proses perbaikan ini dimana masih banyak rincian yang perlu ditetapkan. WWF Indonesia dan Forest Peoples Programme (FPP) turut serta dalam perancangan Forum ini dengan dukungan dari kedua pimpinan organisasi tersebut, serta kehadiran FSC International secara langsung. Forum ini dikembangkan dengan pendekatan yang digunakan oleh The Forests Dialogue dengan tujuan untuk membangun pemahaman bersama mengenai proses perbaikan yang dilakukan oleh APRIL, mendorong kesadaran akan peluang untuk mencapai hasil yang positif, dan mengumpulkan masukan dari semua peserta untuk memperkuat proses ini.

Sebanyak 90 orang hadir dalam Forum yang menampilkan pemaparan dari APRIL dan FSC, diskusi panel yang dipimpin oleh WWF Indonesia dan FPP, diskusi kelompok kecil untuk mengumpulkan masukan, serta sesi tanya jawab dan refleksi. Lebih dari 60 persen peserta berasal dari masyarakat dan LSM lokal, yang berbasis di provinsi-provinsi di mana APRIL dan anggota grup perusahaan beroperasi dan sebagian besar peserta lainnya berasal dari organisasi nasional dan universitas di Indonesia. Pertemuan ini difasilitasi oleh Gary Dunning dari School of the Environment Universitas Yale dan Rulita Wijayaningdyah dari serikat pekerja hutan Indonesia, Kahutindo.

Direktur Jenderal FSC menjelaskan bagaimana Kerangka Kerja Perbaikan FSC dirancang untuk mencapai hasil positif di bidang sosial, lingkungan, dan bisnis. FSC berkomitmen untuk bekerja sama dengan APRIL dalam proses perbaikan dan mengakui



90 ORANG HADIR
DALAM FORUM



60 PERSEN PESERTA
BERASAL DARI
MASYARAKAT DAN
LSM LOKAL

komitmen perusahaan untuk melakukan transformasi dalam praktik operasionalnya dan memperbaiki dampak negatif yang timbul karena kegiatan yang tidak dapat diterima di masa lalu pada periode 1994-2020. Proses perbaikan ini merupakan sebuah proses belajar dan FSC menghadiri Forum ini untuk mendengarkan pendapat dari seluruh peserta.

Director of Sustainability and External Affairs APRIL dan staf senior lainnya menekankan komitmen perusahaan untuk berasosiasi kembali dengan FSC yang diyakini akan bermanfaat bagi masyarakat, lingkungan, perusahaan, dan pembangunan ekonomi Indonesia dengan tujuan mencapai kesuksesan bersama. Mereka menjelaskan bagaimana perusahaan telah membangun peta jalan yang rinci untuk mengimplementasikan proses ini dan memberikan informasi terbaru mengenai prosesnya. APRIL masih berada pada tahap awal proses perbaikan dimana saat ini tengah berjalan penilaian dasar yang dilakukan oleh penilai independen untuk mengumpulkan informasi mengenai dampak sosial dan lingkungan yang terjadi di masa lalu.

Para peserta memberikan masukan, saran, serta harapan yang membangun. Secara keseluruhan, terdapat dukungan yang kuat terhadap pendekatan yang dipresentasikan oleh FSC dan implementasi yang dilakukan oleh APRIL untuk mencapai perbaikan lingkungan dan sosial.

Para peserta meminta dukungan lebih dari FSC dan APRIL untuk mengadakan peningkatan kapasitas masyarakat dan LSM lokal sehingga mereka dapat berpartisipasi dengan lebih efektif dalam proses perbaikan. FSC dan APRIL mengakui kebutuhan ini dan berkomitmen untuk mendukung peningkatan kapasitas LSM dan masyarakat setempat.

Beberapa peserta juga menyatakan perlu adanya peningkatan transparansi dari APRIL dan FSC dalam proses perbaikan ini, termasuk memberikan informasi rinci kepada publik secara berkala. APRIL menegaskan kembali komitmennya terhadap transparansi dan akan membagikan lebih banyak dokumentasi, termasuk metodologi yang digunakan untuk penilaian independen.

Kekhawatiran disampaikan mengenai penilaian dampak sosial dan lingkungan yang sedang berlangsung secara independen, termasuk apa yang dianggap oleh beberapa peserta sebagai kelemahan dalam pelaksanaan prosedur persetujuan atas dasar informasi di awal tanpa paksaan (PADIATAPA). Beberapa perwakilan masyarakat meminta lebih banyak waktu bagi para penilai untuk melakukan kunjungan lapangan dengan konsultasi yang lebih komprehensif dan inklusif, termasuk lebih banyak keterlibatan dengan perempuan dan kelompok-kelompok ekonomi marginal. FSC dan APRIL mencatat kekhawatiran tersebut dan sepakat bahwa penting bagi penilaian ini untuk dilakukan sebaik mungkin, dengan potensi lebih banyak waktu dan sumber daya yang disediakan untuk mendukung pekerjaan para penilai independen.

Beberapa pertanyaan muncul mengenai kemungkinan adanya konflik kepentingan dari para penilai independen serta dugaan kepemilikan perusahaan yang tersembunyi. FSC sedang menyelidiki dugaan tersebut, sementara APRIL dengan tegas membantah semua dugaan mengenai keterkaitan dengan perusahaan-perusahaan terselubung dan praktik-praktik yang tidak dapat diterima.

Beberapa peserta merekomendasikan keterlibatan yang lebih besar dari FSC dengan Pemerintah Indonesia, dan menyatakan bahwa hal ini akan menjadi penting untuk membantu memastikan keberhasilan implementasi perbaikan secara keseluruhan. FSC menegaskan kembali komitmennya untuk melakukan diskusi lebih lanjut dengan Pemerintah.

Dukungan yang kuat juga disampaikan agar proses dialog tersebut dapat dilakukan di provinsi-provinsi di mana APRIL atau entitasnya beroperasi, hal ini diterima dengan baik oleh APRIL dan akan dipertimbangkan sebagai tindak lanjut dari Forum ini.

Sebagai penutup, WWF Indonesia menyampaikan apresiasi atas kepedulian, perhatian, dan kesediaan para peserta untuk menjadi bagian dari proses perbaikan dan menyatakan optimisme bersama dan harapan untuk hasil yang lebih baik bagi lingkungan dan sosial. FPP mencatat bahwa telah terbentuk pemahaman yang seragam dan akan terus terlibat dan mendukung proses perbaikan agar para pemegang hak yang terdampak mendapatkan perbaikan atas dampak negatif yang mereka alami oleh kegiatan yang tidak dapat diterima.

Manajemen APRIL dan FSC menerima dengan baik masukan yang terbuka dan jujur yang diberikan dalam Forum tersebut. FSC menegaskan kesediaannya untuk belajar dari proses perbaikan yang dilakukan APRIL dan akan mengaplikasikan pembelajaran tersebut ke dalam sistem dan kerangka kerja normatifnya. APRIL menekankan komitmennya terhadap proses perbaikan untuk meraih pencapaian baru dalam mengakhiri disosiasi dengan FSC, dan menegaskan bahwa perusahaan melihat hal ini sebagai peluang untuk memberikan dampak lingkungan, sosial, dan ekonomi yang penting bagi masyarakat, masyarakat adat, dan Indonesia secara keseluruhan.

Gambaran Umum Forum

ORGANISASI PENYELENGGARA

APRIL Stakeholder Forum mengenai Proses Perbaikan FSC diselenggarakan dan dipandu oleh APRIL dengan FSC International serta bekerja sama dengan WWF Indonesia dan Forest Peoples Programme. Staf senior dari organisasi-organisasi tersebut berpartisipasi dalam Forum dan membantu memfasilitasi sesi diskusi. Forum ini difasilitasi oleh Gary Dunning, Direktur Eksekutif Forest School di Yale University's School of the Environment dan The Forests Dialogue, dan Rulita Widjyaningdyah, Sekretaris Jenderal Kahutindo, organisasi hak-hak buruh Indonesia yang berafiliasi dengan Building and Woodworkers International.

LATAR BELAKANG

APRIL merupakan perusahaan pertama di dunia yang menjalankan proses perbaikan untuk berasosiasi dengan FSC setelah Kerangka Kerja Perbaikan FSC disahkan oleh dewan direksi FSC pada tahun 2023. APRIL melepaskan diri dari keanggotaan FSC pada tahun 2013 dan kembali berdialog dengan FSC pada tahun 2016. Penilaian garis dasar lingkungan dan sosial dikembangkan sebagai uji coba yang dilakukan oleh FSC kepada APRIL pada tahun 2020, kemudian perjanjian kerja sama disepakati pada tahun 2023 yang menjadi awal dimulainya proses perbaikan ini. Jika APRIL berhasil menyelesaikan proses perbaikan, maka APRIL dan anggota grup perusahaan lainnya akan memenuhi syarat untuk berasosiasi kembali dengan FSC, yang kemudian memberikan kesempatan kepada perusahaan-perusahaan tersebut untuk mengajukan permohonan sertifikasi FSC.

TUJUAN

Tujuan dari Forum ini adalah sebagai berikut:

- » **Memfasilitasi pemahaman bersama** di antara para pemangku kepentingan mengenai proses perbaikan yang sedang dilakukan oleh APRIL.
- » **Memperdalam pemahaman akan peluang hasil positif** dari proses perbaikan bagi para pemegang hak, pemangku kepentingan, dan secara lebih luas bagi upaya konservasi hutan dan pembangunan sosial di Indonesia.
- » **Mengumpulkan masukan dari para peserta untuk memperkuat proses perbaikan yang dilakukan oleh APRIL** dan tercapainya hasil perbaikan terhadap aspek lingkungan dan sosial.

PESERTA

Sedikitnya 90 peserta mendaftarkan diri dan terkonfirmasi hadir dalam Forum, 60 persen diantaranya adalah pemimpin masyarakat, masyarakat adat, dan LSM dari Riau, Sumatera Utara, Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara. Perwakilan dari berbagai LSM nasional dan internasional, pakar akademis, penilai independen FSC, dan perwakilan pemuda juga bergabung dalam Forum ini. (Lihat Lampiran untuk daftar peserta lengkap).

Rulita Widjyaningdyah dan **Gary Dunning**, sebagai co-fasilitator, mendorong pendekatan dialog terbuka berdasarkan proses yang dikembangkan selama 25 tahun terakhir oleh The Forests Dialogue, yang menekankan pada mendengarkan dan keterlibatan aktif, membangun pemahaman bersama dan hasil yang positif. Para peserta sepakat untuk mengikuti aturan dasar yang dikembangkan oleh para fasilitator.

Patrick Anderson bersama Forest Peoples Programme, sebuah organisasi hak asasi manusia yang berbasis di Inggris, yang bekerja untuk mendukung hak-hak kolektif masyarakat hutan di 22 negara, dan termasuk di Indonesia sejak tahun 1990-an, bekerja sama dengan APRIL untuk merancang Forum ini. Prioritas FPP mencakup perbaikan atas semua pelanggaran hak asasi manusia dan hak adat pada periode 1994-2020 yang terkait dengan deforestasi, dan bahwa hal ini diinformasikan dan didukung dengan baik melalui PADIATAPA, dengan perbaikan yang diberikan oleh seluruh grup perusahaan, sebagaimana diidentifikasi oleh FSC. Patrick menekankan bahwa FPP membantu mengorganisir Forum ini karena mereka melihat hal ini sebagai langkah awal yang penting, sebuah kesempatan bagi para peserta, termasuk banyak perwakilan masyarakat, untuk berbagi ide, mengungkapkan kekhawatiran dan meningkatkan dampak dari proses yang dilakukan.

Aditya “Dito” Bayunanda, CEO dari WWF Indonesia, yang juga membantu mengorganisir Forum ini, menegaskan bahwa WWF merupakan salah satu pendukung pertama FSC ketika didirikan pada tahun 1993. WWF, bersama dengan LSM Indonesia lainnya termasuk Jikalahari dan WALHI, telah memantau sektor hutan tanaman industri (HTI) di Riau selama bertahun-tahun. WWF juga mulai bekerja pada tahun 2011 untuk memperbarui tanggal batas akhir deforestasi FSC tahun 1994. Pada tahun 2022, pada General Assembly FSC di Bali, perubahan besar ini diterima sebagai bagian dari Kebijakan Perbaikan FSC. WWF menyerukan agar proses perbaikan dilakukan secara transparan, melibatkan semua pihak yang bertanggung jawab, agar LSM memiliki tanggung jawab untuk memantau kemajuan dan membantu menentukan dampak negatif bersama dengan masyarakat. Perbaikan perlu dilakukan di luar konsesi APRIL dan mencakup lanskap terdampak yang lebih luas, melibatkan LSM, masyarakat, dan pemerintah daerah. Mereka menekankan bahwa perbaikan sosial dan lingkungan harus berjalan beriringan. WWF mengakui komitmen serius yang telah dibuat oleh APRIL untuk menjadi perusahaan pertama dalam proses ini, dan terutama hal ini sangat penting bagi Sumatera, yang merupakan rumah bagi banyak spesies unggulan yang terancam punah. Mereka mendorong semua pihak untuk terbuka terhadap diskusi dan dialog untuk mencapai tujuan menyelamatkan lingkungan dan hutan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Seluruh peserta memperkenalkan diri dan berbagi mengenai harapan mereka dari proses ini. Di bawah ini adalah beberapa kutipan dari para peserta:

“Saya menghargai keterbukaan dan komitmen APRIL, dan saya berharap kita dapat membangun kepercayaan dan menyamakan persepsi.”

“Proses ini tidak akan selesai jika pemerintah tidak diikutsertakan.”

“Saya sudah tua, dan saya ingin perbaikan ini juga dapat mempertahankan budaya, seperti mantra-mantra pengumpulan madu dan ini juga terkait dengan masalah sosial.”

“Saya baru saja terpilih sebagai kepala desa dan saya berterima kasih kepada APRIL karena telah mengundang saya. Butuh waktu sehari-hari untuk mencapai tempat ini dari tempat tinggal saya. Kami sangat berharap perusahaan dapat terus beroperasi dan menciptakan lapangan pekerjaan, serta memberikan manfaat lebih bagi ekosistem, alam, dan masyarakat sekitar. Kami berharap APRIL dapat memberdayakan masyarakat.”

“Kerangka kerja perbaikan perlu diubah menjadi proses praktis untuk mengatasi kebingungan tentang apa itu perbaikan.”

“Saya mengalami pelanggaran hak asasi manusia secara langsung. Saya harap kita bisa menemukan solusi.”

“Kita tidak bisa hanya menyesali masa lalu; yang terbaik adalah mengubah arah melalui perbaikan. Ini adalah langkah besar pertama dalam mewujudkan kerangka kerja perbaikan agar Indonesia dapat menjadi negara kehutanan yang baik.”

“Ini akan membutuhkan waktu karena hubungan kekuasaan membutuhkan waktu untuk dipertimbangkan.”

“Banyak orang yang bekerja keras untuk hal ini dan memiliki harapan yang tinggi bahwa proses ini akan menghasilkan sesuatu bagi masyarakat dan hutan yang dirugikan. Saya memiliki kekhawatiran mengenai proses ini dan ingin agar hal tersebut didengar dan ditanggapi.”

“Saya berharap tinjauan ini dapat memasukkan suara-suara yang tidak pro-perusahaan dan memastikan APRIL mendengarkan suara-suara ini dan memastikan hak-hak mereka dihormati. Kebijakan APRIL bagus di atas kertas, namun di lapangan masih banyak yang harus didiskusikan.”

Proses Perbaikan FSC

Kim Carstensen, Direktur Jenderal FSC, dan Salem Jones, Manajer Program FSC berbicara mengenai Penyelesaian Sengketa dan Perbaikan, memperkenalkan FSC dan memberikan gambaran umum mengenai proses perbaikan FSC..(Lihat Lampiran untuk presentasi FSC).

FSC adalah sistem sertifikasi hutan terdepan di dunia yang bekerja di 90 negara dengan 1.200 anggota, termasuk hampir 40 anggota di Indonesia, dan 60.000 sertifikasi di seluruh dunia. FSC mengembangkan dan menyediakan standar pengelolaan hutan dari sumber yang bertanggung jawab, konservasi di area bersertifikat, dan restorasi hutan. Organisasi ini dibangun di atas demokrasi dan kesetaraan, dengan menyeimbangkan kepentingan lingkungan, sosial, dan bisnis.

Proses perbaikan FSC berlaku sejak tahun 2023 dan baru belakangan ini diadopsi. FSC menekankan pentingnya untuk mendengarkan dan belajar dari Forum ini, terutama mengingat ini adalah proses baru dan APRIL adalah perusahaan pertama yang memulai proses perbaikan.

Tujuan FSC adalah untuk mencapai manfaat lingkungan dan sosial yang berkualitas tinggi dan bermakna, yang menentukan jalur menuju asosiasi kembali. Perbaikan mencakup semua hal, termasuk restorasi, konservasi, restitusi, dan kompensasi kepada masyarakat yang telah merasakan dampak negatif akibat konversi dan kegiatan yang tidak dapat diterima pada periode 1994-2020.

Penilaian dasar lingkungan dan sosial sedang dikerjakan untuk menilai dampak sosial dan lingkungan yang diakibatkan oleh kegiatan yang tidak dapat diterima selama periode 1994-2020. Para penilai independen, yang ditunjuk oleh FSC, juga ikut serta dalam Forum ini.

FSC menyambut baik kesempatan untuk bekerja sama dengan APRIL dalam proses perbaikan, karena melihat perusahaan ini berkomitmen untuk mengubah cara mereka beroperasi dan memperbaiki dampak negatif di masa lalu.

“Kita berada pada tahap pembelajaran dalam proses perbaikan FSC dengan perjalanan yang masih panjang.”

**Kim Carstensen,
Direktur Jenderal, FSC.**

APA YANG DIMAKSUD DENGAN KERANGKA KERJA PERBAIKAN FSC?

Kerangka Kerja Perbaikan FSC dirancang untuk memungkinkan lahan yang dikonversi antara tahun 1994 dan 2020 dapat memenuhi syarat dengan adanya perbaikan bagi masyarakat maupun lingkungan. Kerangka Kerja ini mendefinisikan proses yang harus diikuti oleh perusahaan untuk bergabung kembali dengan FSC dan agar lahan dapat disertifikasi. Saat ini APRIL tidak dapat memiliki lahan yang disertifikasi atau menjual produk bersertifikat karena telah terdisosiasi, namun dengan melakukan perbaikan, perusahaan dapat memenuhi syarat untuk berasosiasi kembali dengan FSC, dan mendapatkan sertifikasi nantinya. Kegiatan perbaikan misalnya meliputi konservasi dan restorasi hutan, restitusi (ganti rugi) dan adopsi prinsip-prinsip hak asasi manusia.

Perbaikan adalah proses yang besar. Pertama, proses ini membutuhkan identifikasi pihak-pihak yang terdampak dan dampak negatif akibat kegiatan yang tidak dapat diterima selama periode 1994-2020. Kemudian, rencana perbaikan dikembangkan dan harus disepakati serta diimplementasikan secara memadai untuk mencapai ambang batas asosiasi dengan FSC, setelah itu kelayakannya dinilai dan proses selesai.

FSC melihat perbaikan sebagai proses perbaikan dan pembaharuan dengan dampak positif pada skala lanskap. Proses perbaikan yang dijalankan oleh APRIL juga dapat membantu mencapai tujuan Pemerintah Indonesia terkait perubahan iklim, keanekaragaman hayati, dan pembangunan berkelanjutan.

APA SAJA PERAN APRIL DAN FSC DALAM PROSES PERBAIKAN?

Peran APRIL adalah untuk menjalankan proses perbaikan, memastikan ketentuan-ketentuan, seperti persyaratan keterlibatan pemangku kepentingan telah terpenuhi, dan hasil-hasilnya divalidasi. FSC mensyaratkan APRIL untuk menunjukkan itikad baik dan melakukan upaya-upaya berkualitas tinggi dengan pertukaran yang terbuka mengenai tantangan-tantangan yang ada, dengan menyadari bahwa kesempurnaan tidak akan mungkin dicapai, sambil bekerja sama untuk menemukan solusi yang membangun.

Peran FSC adalah untuk menetapkan aturan dan standar proses perbaikan dan untuk memfasilitasi pelaksanaan proses tersebut, termasuk menunjuk kelompok penilai independen dan verifikator pihak ketiga, serta mengelola portal data untuk berbagi informasi terbaru dan laporan pelaksanaan dari verifikator pihak ketiga. Yang terpenting, FSC juga memastikan tidak ada *greenwashing*.

FSC mendorong dan mengharapkan para pemangku kepentingan untuk berpartisipasi secara aktif dalam proses tersebut dan memastikan perbaikan terjadi di lapangan.

APA YANG DIPERTARUHKAN?

Pembelajaran sangat penting karena ini merupakan proses perbaikan pertama di dunia yang akan dilaksanakan di bawah kebijakan baru FSC. Proses ini dapat menghasilkan area hutan dan jasa ekosistem yang luas untuk diperbaiki, dengan PADATAPA dan restitusi sosial. Kriteria keberhasilan mencakup pembelajaran, peningkatan proses perbaikan di masa depan, manfaat lingkungan dan sosial, serta peningkatan kepercayaan terhadap APRIL (dan FSC) berdasarkan hasil yang dicapai.

Status Proses Perbaikan untuk Berasosiasi dengan FSC yang Dilakukan APRIL Group

Director of Sustainability and External Affairs APRIL, Lucita Jasmin, memberikan gambaran umum mengenai APRIL Group dengan menekankan kontribusi perusahaan terhadap perekonomian nasional dengan menciptakan 260.000 kesempatan kerja, dan komitmen untuk tidak melakukan deforestasi sejak tahun 2015. Kebijakan keberlanjutan APRIL Group, khususnya Kebijakan Pengelolaan Hutan Berkelanjutan (Sustainable Forest Management Policy), mendasari pendekatan ini, dan perusahaan telah mencapai 80 persen dari “komitmen 1:1” untuk melestarikan satu hektar hutan alam untuk setiap hektar hutan tanaman industri (HTI) yang dikelola APRIL2030 mencakup komitmen lintas iklim, alam, sumber daya manusia, dan pertumbuhan berkelanjutan. APRIL berencana untuk memenuhi permintaan yang meningkat dari fasilitas manufakturnya dengan meningkatkan produktivitas serat sebesar 50 persen di area hutan tanaman industri (HTI) yang sudah ada.

APRIL berkomitmen untuk melakukan perbaikan dan berasosiasi kembali dengan FSC karena beberapa alasan penting. Perusahaan percaya bahwa Indonesia layak diakui secara global sebagai salah satu yang terbaik dan terbesar di bidang Hutan Tanaman Industri dan manufaktur. Akses pasar yang adil didorong oleh mendapatkan asosiasi dan sertifikasi FSC, sehingga dampak negatif di masa lalu harus ditangani dengan sistem dan proses yang diterapkan di perusahaan untuk mencegah kemungkinan terjadinya kegiatan yang tidak dapat diterima kembali.

Konservasi dan restorasi hutan yang signifikan bagi lingkungan, kolaborasi lintas lanskap, dukungan terhadap taman nasional dan kemitraan dengan LSM konservasi dalam restorasi ekosistem dan konservasi spesies, kemungkinan besar seluruhnya akan menjadi bagian dari proses perbaikan untuk berasosiasi dengan

“APRIL melihat kerangka kerja perbaikan untuk berasosiasi dengan FSC sebagai peluang untuk kebaikan bersama.”

Lucita Jasmin,
Director of Sustainability,
APRIL Group.

FSC yang dilakukan APRIL.

Manfaat sosial dari perbaikan ini dapat mencakup peningkatan akses terhadap sumber daya lahan dan hutan bagi masyarakat, peningkatan kapasitas, perhutanan sosial dan kemasyarakatan, dan kemitraan baru di bidang agroforestri dan pertanian berkelanjutan, serta peningkatan penyelesaian sengketa lahan. Bagi Pemerintah Indonesia, upaya-upaya tersebut akan berkontribusi dalam memenuhi target pembangunan iklim, alam, dan ekonomi yang penting di tingkat nasional dan internasional.

Bagi APRIL Group sendiri, proses perbaikan ini telah membantu mendorong transformasi secara internal untuk menyelesaikan isu-isu di masa lalu, memperbaiki sistem dan praktik, membangun keterlibatan dan komunikasi, serta memperluas kemitraan dan kepercayaan.

Mengundang dan mendengarkan masukan merupakan hal yang penting dalam memperkuat upaya perbaikan untuk berasosiasi dengan FSC yang dilakukan APRIL sebagai sebuah proses pembelajaran yang berkelanjutan, mengingat hal ini baru pertama kali diterapkan secara global dan sangat bergantung pada dukungan dan keterlibatan yang membangun dari berbagai pihak.

Christopher Burchmore dari APRIL mempresentasikan bagaimana Kerangka Kerja Perbaikan untuk Berasosiasi dengan FSC dilakukan oleh APRIL . *(Lihat laman Pusat Data dalam APRIL Remedy Microsite untuk bahan presentasi APRIL atau klik [disini](#)).*

PENERAPAN KERANGKA KERJA PERBAIKAN FSC PADA APRIL GROUP DAN GRUP PERUSAHAAN YANG LEBIH LUAS

Proses perbaikan APRIL melibatkan tiga bab proses dan tindakan. Bab 1 dan 2 berlaku untuk seluruh grup perusahaan dan mencakup kebijakan, risiko, sistem dasar, dan kepercayaan, yang berpotensi untuk membawa perubahan yang transformatif bagi grup perusahaan APRIL di Indonesia, Tiongkok, Brasil dan lainnya. Kebijakan-kebijakan penting telah dikembangkan dan kini sedang diadopsi di seluruh grup perusahaan terkait hak asasi manusia, sumber daya, integritas, dan etika.

Bab 3 menjelaskan tahapan lebih lanjut. Ada tujuh tahapan yang harus dijalankan oleh APRIL Group yang terurai menjadi 36 indikator. APRIL Group saat ini berada pada tahap kedua dari tujuh tahapan tersebut, yaitu mengembangkan data dasar (baseline) yang dilakukan oleh penilai independen.

Tiga area dampak yang dicakup dalam proses perbaikan APRIL adalah konsesi yang dikelola oleh APRIL di Riau, konsesi TPL di Sumatra Utara, serta konsesi Adindo Hutan Lestari dan Itci Hutan Manunggal di Kalimantan Utara dan Timur.

APRIL mengembangkan metode yang kini diterapkan oleh para penilai independen. Evaluasi oleh penilai independen melibatkan penentuan kondisi sebelum terjadinya

kegiatan yang tidak dapat diterima, kemudian melihat keadaan saat ini, dan mengumpulkan dokumentasi serta informasi melalui kunjungan ke lokasi, wawancara, analisis historis, termasuk berkonsultasi dengan pemegang hak. Di Riau dan Kalimantan, pekerjaan para penilai independen dihentikan sementara untuk mempertimbangkan kemungkinan pengelolaan adaptif dari pendekatan tersebut sebelum melanjutkannya.

KONSULTASI DAN DIALOG DENGAN PEMANGKU KEPENTINGAN

APRIL menyambut baik dan mendorong masukan mengenai apa yang dapat dilakukan dengan lebih baik dalam proses perbaikan, dan forum pemangku kepentingan ini merupakan langkah penting dalam mengkomunikasikan pesan ini. Sistem dialog dengan “kelompok dialog inti” untuk setiap area dampak (provinsi) merupakan persyaratan utama dari Kerangka Kerja Perbaikan FSC, untuk mengadakan pertemuan, menyepakati, dan memfasilitasi perbaikan dampak negatif, yang dihadiri perwakilan dari APRIL dan pemegang hak yang terdampak dari berbagai kelompok, serta penasihat untuk pemegang yang sesuai dengan pada persetujuan tertulis dari pemegang hak. Para pemangku kepentingan dan ahli yang berkepentingan juga dapat diikutsertakan dengan persetujuan dari para pemegang hak.

RINGKASAN PROSES PERBAIKAN YANG DILAKUKAN APRIL

Proses perbaikan secara keseluruhan memiliki empat fase:

1. Identifikasi dampak sosial dan lingkungan (APRIL saat ini sedang berada dalam tahap pertama).
2. Perencanaan perbaikan, dengan kelompok dialog inti yang dibentuk untuk mendukung konsultasi dan keterlibatan.
3. Implementasi perbaikan.
4. Mengakhiri disosiasi dengan FSC.

Mekanisme pengaduan masyarakat telah dibentuk oleh APRIL khusus untuk proses perbaikan dan Chris membagikan beberapa tautan dan saluran bagi peserta untuk mencari informasi dan berkomunikasi lebih lanjut dengan APRIL.

Tantangan dan Peluang yang Dikemukakan oleh Peserta

Para peserta terlibat dalam tanya jawab mendalam dengan APRIL dan FSC, memberikan masukan dan menyampaikan isu. Terdapat pula sesi breakout dan diskusi pleno serta refleksi. Beberapa topik utama yang muncul melalui diskusi dan perspektif masing-masing topik dirangkum di bawah ini.

PROSES PERBAIKAN YANG DILAKUKAN APRIL DISAMBUT BAIK OLEH SEBAGIAN BESAR PESERTA – MEREKA INGIN PROSES INI BERHASIL.

Sepanjang forum, para peserta menyambut baik kerangka kerja dan proses perbaikan APRIL FSC. Mereka menyatakan dukungan kuat kepada APRIL karena berkomitmen untuk menjalani proses ini serta melakukan perbaikan lingkungan dan sosial. Baik FSC maupun APRIL berulang kali menekankan bahwa ini adalah proses pembelajaran bersama dan belum pernah dilakukan sebelumnya. Mereka mendorong para peserta untuk memberikan masukan yang jujur melalui berbagai saluran yang tersedia baik secara langsung kepada FSC maupun kepada perusahaan.



Lukas Nai, seorang kepala desa dari Kalimantan Timur, menyatakan harapannya bahwa desanya yang relatif kecil dan memiliki sedikit peluang ekonomi, dapat bekerja sama dengan APRIL dalam proses perbaikan ini karena mereka terus hidup dari tanah mereka.



Dirsa, seorang perwakilan pemuda dan mahasiswa kehutanan, berterima kasih kepada APRIL dan FSC atas kesempatan untuk berpartisipasi dengan harapan bahwa Forum ini akan diikuti dengan konsultasi lebih lanjut.

FSC dan APRIL harus membantu mengatasi kekurangan kapasitas untuk berpartisipasi dalam proses perbaikan di masyarakat lokal dan LSM, dan diperlukan lebih banyak upaya untuk membangun pemahaman yang lebih dalam tentang proses tersebut oleh para pemangku kepentingan dan pemegang hak.

Proses perbaikan untuk berasosiasi dengan FSC yang dilakukan oleh APRIL sangat rumit, dan bagi banyak peserta, Forum ini adalah pertama kalinya mereka mendapat kesempatan untuk mendapatkan penjelasan secara rinci dan berdiskusi dengan FSC dan APRIL. Ditekankan bahwa sangat penting bagi semua pihak untuk memahami proses perbaikan ini. Beberapa pihak berkomentar bahwa diperlukan penjelasan lebih lanjut mengenai proses perbaikan, dan terdapat kurangnya pemahaman mengenai siapa yang berhak menerima perbaikan, bagaimana mereka diidentifikasi, dan bagaimana mereka akan diikutsertakan dalam proses tersebut.



Patrick Anderson dari Forest Peoples Programme berbicara tentang perlunya pendanaan untuk membangun kapasitas masyarakat dan LSM lokal, dan mendesak FSC untuk mengatasi kebutuhan ini. Ia juga menyerukan agar Forum ini dilakukan di provinsi-provinsi yang terdampak dan mendorong pengembangan program percontohan untuk berbagi pembelajaran guna membantu mempercepat proses.



Harry Oktavian, Direktur LSM Bahtera Alam, yang berbasis di Pekanbaru, Riau, menggambarkan bagaimana kelompoknya merancang materi bagi masyarakat guna membantu mereka terlibat dalam proses perbaikan FSC. Beliau menekankan bahwa masyarakat memerlukan pelatihan mengenai FSC, persiapan negosiasi, dan proses PADIATAPA.

Peserta lain menekankan bahwa Forum ini sangat berguna, karena dibutuhkan lebih banyak dana untuk peningkatan kapasitas dan pelatihan. Baik FSC maupun APRIL mengakui perlunya dukungan untuk peningkatan kapasitas dan berkomitmen untuk memberikan lebih banyak dukungan kepada LSM dan masyarakat lokal.

TRANSPARANSI YANG LEBIH BESAR DALAM PROSES PERBAIKAN

Beberapa peserta menyatakan perlunya transparansi yang lebih besar dalam beberapa aspek proses termasuk metode yang digunakan oleh penilai independen dan perjanjian antara FSC dan APRIL. Peserta meminta pembaruan rutin dan lebih rinci tentang kemajuan proses ini. Seperti yang diungkapkan salah satu peserta, “Kepercayaan antar semua pihak diperlukan dan untuk itu kita memerlukan transparansi di seluruh proses, termasuk mekanisme untuk memberikan informasi terkini kepada semua pihak mengenai kemajuan yang dicapai.” Yang lain mendorong, “Kesetaraan, transparansi, dan dialog partisipatif penting dalam seluruh proses.”

APRIL berterima kasih kepada para peserta atas pertanyaan mengenai metode dan definisi, serta transparansi. Mereka menegaskan kembali komitmen terhadap transparansi dan metode yang digunakan oleh penilai independen akan tersedia bagi para peserta.

Terdapat kekhawatiran mengenai penilaian dasar dan pekerjaan para penilai independen, termasuk apakah hak atas PADIATAPA dihormati

**“APRIL
mengapresiasi
harapan agar
metode penilaian
independen lebih
transparan dan akan
menyediakannya.”**

Chris Burchmore, APRIL.

Komentar dan kekhawatiran muncul mengenai langkah awal yang penting dalam proses perbaikan FSC, yaitu melakukan penilaian dasar untuk mengidentifikasi dampak negatif lingkungan dan sosial yang berada dalam lingkup proses tersebut. Poin-poin yang disampaikan oleh peserta antara lain sebagai berikut:

 <p>SEMUA HAK MASYARAKAT HARUS DIAKUI, TERMASUK KEPEMILIKAN TANAH DAN AKSES TERHADAP TANAH DAN SUMBER DAYA.</p>	 <p>HARUS ADA PROSES YANG LEBIH KUAT UNTUK MENGIDENTIFIKASI MASYARAKAT YANG TERDAMPAK DALAM LINGKUP PROSES PERBAIKAN INI.</p>
 <p>KARENA SITUASINYA KOMPLEKS, MAKA PENTING BAGI PENILAI INDEPENDEN UNTUK MENGHABISKAN LEBIH BANYAK WAKTU DI LAPANGAN DAN BERINTERAKSI DENGAN BANYAK ORANG TERMASUK PEMUDA DAN PEREMPUAN.</p>	
 <p>PENILAIAN DASAR MEMERLUKAN METODE YANG KUAT DAN MEMBERIKAN MANFAAT SOSIAL DAN LINGKUNGAN YANG SAMA.</p>	 <p>KETERLIBATAN MASYARAKAT ADAT DAN KOMUNITAS LOKAL LAINNYA DALAM PROSES PERBAIKAN SANGATLAH PENTING.</p>
<p>PENTING UNTUK MENDENGARKAN SUARA MASYARAKAT YANG KEHILANGAN TANAHNYA, DAN KELOMPOK MARGINAL LAINNYA SEPERTI PEREMPUAN DAN PEMUDA, DAN TIDAK HANYA MELAKUKAN PENDEKATAN KEPADA ELIT DESA UNTUK BERKONSULTASI.</p>	
 <p>IDENTIFIKASI DAN VERIFIKASI YANG TEPAT MENGENAI KOMUNITAS MANA SAJA YANG MENGALAMI DAMPAK NEGATIF DAN HAL APA SAJA YANG PENTING.</p>	 <p>UNTUK MENJAMIN PERBAIKAN SOSIAL JANGKA PANJANG, DIPERLUKAN KEPASTIAN HUKUM ATAS KEPEMILIKAN LAHAN BAGI MASYARAKAT LOKAL, DAN HAL INI HANYA DAPAT DISEDIAKAN OLEH PEMERINTAH INDONESIA.</p>



Rudiansyah, Koordinator LSM Yayasan Kehutanan Masyarakat Lestari, menegaskan kembali isu mengenai tantangan praktis dalam melakukan penilaian dampak negatif di ratusan desa yang terdampak dalam jangka waktu singkat.



Martha Doq, Direktur Perkumpulan Nurani Perempuan, sebuah Kelompok Perempuan Adat di Kalimantan Timur, menyerukan kepada para penilai dan auditor yang bekerja dengan FSC untuk lebih terlibat dengan kelompok perempuan karena perempuan sering melihat dampak secara langsung, seperti ketika sumber air rusak atau ketika mereka kehilangan akses terhadap tanaman herbal dan obat-obatan tradisional di hutan. Ia menekankan bahwa Masyarakat Adat mempunyai keterikatan pribadi terhadap hutan, hutan adalah hidup mereka, dan mereka akan mengorbankan apapun untuk melindungi hutan. Mereka hanya meminta satu hal: diakui sebagai masyarakat adat, dan mereka ingin mencari jalan ke depan bersama APRIL, jika perusahaan menghormati masyarakat.

Beberapa peserta menyerukan penerapan PADIATAPA yang lebih ketat untuk membantu memastikan bahwa tidak ada pelanggaran hak lebih lanjut selama proses perbaikan.



Mahir Takaka dari PUG, konsultan independen, berharap akan ada langkah berani dan tegas dari FSC untuk memahami praktik terbaik Masyarakat Adat yang berhasil mengelola hutannya.



Isnadi Esman Kepala Desa Pulau Padang, Riau, menjelaskan bagaimana ia mendorong pemetaan partisipatif dengan dukungan lembaga pemerintah, bekerja sama dengan seluruh keluarga di desanya untuk mengeksplorasi kondisi sungai, hutan, dan kebutuhan setiap keluarga. Mereka mencapai kesepakatan dan menandatangani MOU dengan APRIL dan menghasilkan keuntungan positif yang signifikan termasuk membangun perkebunan sagu dan memenuhi syarat untuk mendapatkan peningkatan pendanaan pemerintah.

FSC dengan hati-hati memperhatikan isu mengenai kualitas penilaian independen dan menekankan bahwa Forum telah membantu dan tepat waktu dalam menyampaikan isu ini.

APRIL mengingatkan para peserta bahwa perusahaan saat ini belum berada dalam tahap implementasi perbaikan dan belum semua pemegang hak telah teridentifikasi. APRIL menekankan pemahaman bahwa hal ini perlu dilakukan dengan benar.

APRIL juga menyetujui bahwa PADIATAPA – dan verifikasi PADIATAPA – merupakan bagian penting dari proses ini, terutama bagi pemegang hak yang terdampak. APRIL menjelaskan bahwa para penilai independen belum mencapai titik untuk menyampaikan kembali hasil penilaian mereka kepada para pemegang hak yang terdampak, yang akan dilakukan pada waktunya.

“Terima kasih atas masukan yang berharga, sebagai penilai independen kami berkomitmen untuk melakukan pekerjaan sebaik mungkin.”

**Dwi Rahmad Muhtuman,
Direktur Re-Mark Asia.**

FSC mengklarifikasi bahwa mengenai PADIATAPA, Kerangka Kerja Perbaikan FSC mencakup “gerbang PADIATAPA yang terverifikasi” dan proses PADIATAPA yang ditentukan diadaptasi dari panduan PADIATAPA FSC dan sistem pengelolaan hutan FSC. FSC juga mengembangkan indikator untuk verifikasi PADIATAPA dengan para ahli dan penasihat yang berasal dari Masyarakat Adat. Hal ini seharusnya selesai pada akhir tahun 2024 dengan adanya webinar yang direncanakan untuk berbagi mengenai output dan semua peserta Forum ini akan diundang.

Menanggapi pertanyaan tentang bagaimana “Masyarakat Adat” didefinisikan, FSC menjelaskan bahwa Kerangka Kerja Perbaikan FSC mengadopsi definisi change to UNDRIP dan ini adalah dasar untuk mendefinisikan pemegang hak yang terdampak. Perwakilan masyarakat adat di Forum menerima pendekatan ini.



Dwi Rahmad Muhtuman, Direktur Re-Mark, salah satu penilai independen, mengatakan bahwa FSC mengambil langkah penting dalam mengembangkan kerangka perbaikan. Ia berterima kasih kepada para peserta atas masukan yang mereka berikan untuk membantu meningkatkan pekerjaan mereka dan mendorong peserta untuk menghubunginya untuk memberikan masukan lebih lanjut. Ia berterima kasih kepada FSC dan APRIL yang telah mempercayai Re-Mark untuk menjadi bagian dari proses ini.

Beberapa peserta berpendapat bahwa penilai independen mungkin mempunyai konflik kepentingan dan hal ini harus diatasi.

Kekhawatiran mengenai konflik kepentingan para penilai independen dikemukakan berdasarkan riwayat bahwa penyedia layanan ini mempunyai kontrak lain dengan APRIL. Grant Rosoman dari Greenpeace mendesak FSC untuk mengungkapkan alasan persetujuan Re-Mark Asia dan Hatfield sebagai penilai independen. FSC mengakui kemungkinan adanya konflik kepentingan di antara para penilai independen dan sudah memperhatikan hal ini dalam proses seleksi.

Beberapa peserta menduga bahwa APRIL mungkin menyembunyikan kepemilikan perusahaan yang terlibat dalam deforestasi dan juga menyampaikan keluhan khusus mengenai kasus yang melaporkan anggota masyarakat ke polisi atas dugaan perambahan di wilayah konsesi PT Adindo, yang mengakibatkan penangkapan dan pemenjaraan anggota masyarakat tersebut.

Beberapa peserta mengemukakan kekhawatiran khusus mengenai dugaan kepemilikan tersembunyi oleh entitas yang terkait dengan APRIL atas perusahaan yang terlibat dalam praktik deforestasi, yang termasuk dalam kegiatan yang tidak dapat diterima. Yang lain merasa khawatir atas penangkapan dan pemenjaraan yang baru-baru ini terjadi terhadap seorang anggota masyarakat atas dugaan perambahan di wilayah konsesi PT Adindo.

FSC mencatat bahwa definisi “grup perusahaan” telah ditentukan oleh FSC untuk proses perbaikan APRIL dan tersedia secara online mengenai daftar seluruh perusahaan yang terkait dengan APRIL. FSC menyatakan bahwa mereka sedang menyelidiki tuduhan dari beberapa LSM mengenai kepemilikan atau kendali tersembunyi oleh entitas yang terkait

dengan APRIL terhadap perusahaan yang melakukan kegiatan yang tidak dapat diterima setelah tahun 2020. APRIL dan RGE telah berulang kali menolak tuduhan tersebut.

APRIL mencatat isu tersebut dan menekankan bahwa hal inilah yang menjadi salah satu alasan dilakukannya proses perbaikan, yaitu dengan mengumpulkan informasi dan kemudian melaksanakan perbaikan, dengan kebijakan yang kuat di seluruh perusahaan. Khusus untuk kasus PT Adindo, APRIL memberi tahu para peserta bahwa mereka sedang menyelidiki situasi tersebut dan bertujuan untuk menyelesaikannya dengan cara yang tidak melibatkan proses peradilan.

Menanggapi pertanyaan spesifik, APRIL menjelaskan bahwa jika proses perbaikan APRIL dengan FSC ditunda karena alasan apa pun, maka kondisi yang memungkinkan terjadinya perbaikan akan berubah. Insentif sertifikasi FSC dan pengaruh pada grup perusahaan yang lebih luas tidak lagi tersedia.

Sementara itu, perkembangan peraturan penting seperti Peraturan Bebas Deforestasi Uni Eropa dapat memberikan jalur alternatif untuk akses pasar.

FSC juga mencatat bahwa jika APRIL kembali bergabung dengan FSC dan lahannya telah disertifikasi, maka lahan tersebut harus terus dikelola sesuai dengan standar FSC melalui audit tahunan.

SKALA LANSKAP DAN PEMIKIRAN JANGKA PANJANG PENTING AGAR PROSES PERBAIKAN UNTUK BERASOSIASI DENGAN FSC BERHASIL

Pendekatan skala lanskap didukung oleh beberapa peserta dengan mendorong perbaikan di luar wilayah terdampak, langsung ke lanskap yang lebih luas dan konsultasi pemangku kepentingan di tingkat lanskap. Mereka menekankan bahwa lanskap sosial bersifat kompleks dengan banyaknya klaim yang berbeda. Keadilan sosial, kebutuhan ekonomi dan lingkungan harus seimbang, dan berdasarkan konsensus, serta penting untuk memberikan waktu bagi proses tersebut untuk berjalan, karena proses ini memakan waktu dan bersifat kompleks.

WWF Indonesia memfasilitasi diskusi panel dengan komentar dari **Prof. Agus Setyarso** dari Universitas Gajah Mada dan **Dr. Muhammad Ali Imron**, Direktur Hutan dan Margasatwa WWF. Mereka mengeksplorasi berbagai aspek proses perbaikan

“FSC harus segera menyelidiki pengendalian bersama atas PT Mayawana Persada dan PT Asia Forestama Raya yang dilakukan oleh RGE Group, dan jika ditemukan, tangguhkan peta jalan dan proses perbaikan dengan APRIL.”

Grant Rosoman,
Greenpeace.

“APRIL telah berulang kali dan dengan tegas membantah tuduhan adanya hubungan dengan perusahaan tersembunyi dan praktik-praktik yang tidak dapat diterima.”

Lucita Jasmin,
Direktur Sustainability
and External Affairs,
APRIL Group.

untuk bergabung kembali dengan FSC yang dilakukan oleh APRIL termasuk definisi, validitas eksternal, serta peluang dan tantangan implementasi dengan studi kasus konservasi gajah skala lanskap di Sumatera.

KETERLIBATAN DENGAN PEMERINTAH INDONESIA SANGATLAH PENTING

Beberapa peserta, termasuk **Made Ali dari Jikalahari**, menyatakan perlunya keterlibatan dan dukungan dari Pemerintah Indonesia dalam proses perbaikan. Harmonisasi antara pemerintah, LSM, akademisi, dan perusahaan akan membantu memastikan kelancaran proses. Sementara itu, Pemerintah dapat mengubah peraturan yang mempengaruhi proses perbaikan dan memainkan peran yang membantu dalam penyelesaian sengketa.

FSC menyatakan bahwa mereka berencana untuk berhubungan dengan Pemerintah Indonesia dan melibatkan mereka dalam proses tersebut. FSC juga akan mengeksplorasi penggunaan istilah-istilah yang lebih sesuai dengan konteks oleh Pemerintah Indonesia, namun belum tentu bisa sepenuhnya dapat mengadopsi bahasa tersebut.

Refleksi penutup dari APRIL, FSC, FPP dan WWF-Indonesia

WWF INDONESIA
ADITYA BAYUNANDA:

“Saya kini lebih optimis dan komitmen WWF Indonesia adalah untuk terus mendukung proses perbaikan dengan harapan dampak lingkungan dan sosial yang lebih baik.”

Aditya Bayunanda, CEO, WWF Indonesia.

“Ada kepedulian, perhatian, dan kesediaan yang mendalam untuk menjadi bagian dari proses perbaikan ini, yang dibuktikan dengan tingkat partisipasi termasuk dari mereka yang secara konsisten kritis terhadap APRIL. Kritik yang hadir di Forum ini menandakan bahwa proses perbaikan ini didukung secara luas oleh masyarakat, LSM, akademisi, dan perusahaan lain. Kami mengapresiasi kehadiran APRIL dan Direktur Jenderal FSC, juga berterima kasih kepada para penilai independen yang telah mendengarkan dengan seksama, dan menyatakan bahwa belum terlambat bagi para penilai independen untuk meningkatkan kinerja mereka. Forum serupa diperlukan di lanskap, provinsi, dan kabupaten yang terdampak. Saya kini lebih optimis dan komitmen WWF Indonesia adalah untuk terus mendukung proses perbaikan dengan harapan mendapatkan dampak lingkungan dan sosial yang lebih baik.”

FPP

MARCUS COLCHESTER:

“Telah terbentuk kesamaan pemahaman, yang mana sangat penting.”

Marcus Colchester,
Penasihat Senior,
Forest Peoples Programme.

“Terima kasih APRIL dan seluruh peserta atas pertemuan yang sangat bermanfaat telah terbentuk kesamaan pemahaman, yang mana sangat penting. Saya merasa ini adalah hal baik bahwa APRIL telah mempertegas pendekatan mereka, staf FSC juga hadir dan menjelaskan visi serta peran mereka, dan yang terutama adalah suara masyarakat ada di sini dan didengar, kita semua telah belajar banyak. Selanjutnya, kita perlu mendengar lebih banyak dari penilai independen mengenai pendekatan mereka. Kita harus mulai dengan berbagi lebih banyak informasi dan meningkatkan keterlibatan, sehingga kita lebih terinformasi mengenai peran dan apa saja yang diharapkan.

Waktu telah terbuang sia-sia karena penilaian dampak dilakukan sebelum pemegang hak siap untuk terlibat dalam proses PADIATAPA yang tepat. Saya harap kita memiliki lebih banyak kepercayaan sehingga kita dapat menempuh jalan ke depan dalam persahabatan. Terima kasih semuanya atas komitmen dan semangatnya, dan andalkan FPP untuk tetap terlibat dan mendukung proses ini.”

FSC

KIM CARSTENSEN:

“Kami melihat hal ini sebagai peluang besar untuk memberikan dampak nyata di lapangan.”

Kim Carstensen,
Direktur Jenderal, FSC.

“Terima kasih untuk hari yang luar biasa. Kami datang ke sini untuk belajar dan mencapai hasil serta bergerak dengan keadilan bersama bagi lingkungan, masyarakat, bisnis, dan Indonesia. Kami melihat hal ini sebagai peluang besar untuk memberikan dampak nyata di lapangan. FSC senang melihat pemahaman sesungguhnya dari tantangan, kompleksitas, dan kebutuhan akan dukungan bagi masyarakat, agar pemegang hak dapat terlibat dengan cara yang tepat, serta untuk transparansi dan keterlibatan dengan pemerintah. Ini adalah hal yang sangat penting bagi FSC, kami mengerahkan banyak sumber daya untuk mengembangkan kerangka kerja perbaikan ini. Penting bagi kami untuk melanjutkan diskusi ini pada tingkat lanskap mengenai isu-isu dan situasi nyata. Komitmen kami ada untuk memberikan panduan, alat, solusi, serta masukan, dan kami ingin mewujudkannya menuju kesuksesan.”

APRIL
LUCITA JASMIN:

“APRIL berkomitmen penuh terhadap proses perbaikan untuk berasosiasi dengan FSC dan melihat hal ini sebagai peluang yang sangat penting bagi kemenangan bersama, bagi masyarakat, lingkungan, Masyarakat Adat, dan bagi Indonesia secara keseluruhan.”

Lucita Jasmin,
Director of Sustainability, APRIL.

“Terima kasih banyak kepada FSC, WWF Indonesia dan FPP atas partisipasinya, tanpa mereka kita tidak akan bisa menghadirkan peserta yang beragam dan agenda yang begitu dalam. APRIL berterima kasih kepada para fasilitator, dan yang paling penting terima kasih yang setulusnya kepada seluruh peserta atas masukan yang bermakna, kredibel, dan membangun selama dua hari.

“APRIL dengan jelas mendengar masukan dari para peserta yang menyerukan transparansi dan peningkatan konsultasi untuk menjadi lebih inklusif dan melibatkan mereka yang paling terdampak. APRIL akan berdiskusi dengan FSC bagaimana cara untuk memperkuat penilaian independen tersebut. APRIL terbuka untuk berdiskusi dengan LSM lokal dan dukungan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan peningkatan kapasitas mereka. Keluhan yang spesifik, misalnya mengenai PT Adindo, akan disampaikan kembali kepada rekan kerja untuk ditindaklanjuti.

“Pada langkah selanjutnya, APRIL akan mempertimbangkan dengan cermat peluang dan kebutuhan untuk menyelenggarakan forum di tingkat lokal dan lanskap, seperti yang direkomendasikan oleh banyak peserta.

Sebagai penutup, APRIL berkomitmen penuh terhadap proses perbaikan untuk berasosiasi dengan FSC dan melihat hal ini sebagai peluang yang sangat penting bagi kemenangan bersama, bagi masyarakat, lingkungan, Masyarakat Adat, dan bagi Indonesia secara keseluruhan.”

Lampiran

CATATAN KELOMPOK PERBAIKAN SOSIAL

Sembilan belas peserta mengikuti sesi breakout mengenai perbaikan sosial pada hari pertama yang difasilitasi oleh Forest Peoples Programme (FPP), dengan hasil diskusi yang dirangkum sebagai berikut:

MANFAAT KERANGKA KERJA PERBAIKAN

- » Kerangka Kerja Perbaikan menawarkan peluang besar bagi masyarakat jika diterapkan dengan benar seperti yang dinyatakan dalam kebijakan FSC.
- » Oleh karena itu, mencapai kondisi yang mendukung sangat penting untuk implementasi yang sukses.

PELATIHAN DAN PENINGKATAN PEMAHAMAN

- » Proses ini harus bersifat transparan dan bertanggung jawab, di mana kelompok masyarakat perlu diberitahu sebelumnya tentang pelaksanaan Kerangka Kerja Perbaikan.
- » Tanpa informasi dan perwakilan yang tepat, masyarakat khawatir proses dapat dimanipulasi atau membuat bingung sehingga pelaksanaan Kerangka Kerja Perbaikan tidak akan efektif.
- » Langkah-langkah pembangunan kapasitas dan peningkatan pemahaman perlu dilakukan terlebih dahulu. LSM lokal dan akademisi dapat membantu dalam kegiatan ini.
- » Pelatihan untuk masyarakat mengenai PADIATAPA sangat penting, begitu pula dalam negosiasi dan resolusi konflik.
- » Diperlukan pendanaan untuk semua proses ini dan 'Blind Trust', yang telah lama diusulkan perlu segera dibentuk.

REPRESENTASI MANDIRI

- » Langkah-langkah konkret harus dilaksanakan sejak awal untuk memastikan perwakilan masyarakat yang inklusif dan dipilih sendiri oleh kelompok masyarakat tersebut— masyarakat sering kali terpecah secara horizontal dan vertikal. Proses ini tidak bisa dilakukan dengan tergesa-gesa.
- » Jika penilai independen hanya berbicara dengan tetua desa dan kepala desa maka keputusan masih akan berasal dari atas ke bawah relatif dari sudut pandang masyarakat yang lebih luas.

MASALAH YANG BERLANGSUNG

- » Laporan mengenai kriminalisasi orang-orang yang menggunakan tanah adat mereka terus terjadi (misalnya, PT Adindo).
- » Proyek HTI sering kali mendatangkan tenaga kerja dari luar, terkadang sebagai transmigran yang membawa masalah bagi masyarakat adat. Dalam beberapa kasus, masalah ini menimbulkan masalah bagi masyarakat adat karena mereka dinilai tidak menghormati tanah dan mata pencaharian adat serta menggunakan sumber daya masyarakat adat.
- » Terdapat masalah yang lebih besar dengan pemasok APRIL, meskipun mereka menyediakan 100 persen kayu mereka ke pabrik APRIL namun mereka tidak memiliki standar bekerja yang sama.
- » Penilai independen dinilai tidak berjalan sesuai dengan Kerangka Kerja Perbaikan. Tidak ada representasi mandiri. Sebaliknya, penilai hanya berbicara dengan beberapa anggota tetua atau kepala desa. Penilai tidak secara langsung mengunjungi desa-desa tetapi hanya mengandalkan data sekunder dan artikel surat kabar. Terdapat kekhawatiran bahwa daftar hadir yang ditandatangani dianggap sebagai persetujuan PADIATAPA.
- » Penilai independen berasumsi bahwa jika lokasi desa tidak berada di HTI maka mereka tidak terdampak. Pertanyaannya seharusnya sebaliknya: apakah HTI tumpang tindih dengan desa (atau tanah adat)?
- » Penilai independen perlu menghabiskan lebih banyak waktu di desa-desa dan mewawancarai orang-orang tentang sejarah mereka, penggunaan tanah, dan hak atas tanah.
- » Saat ini, penilai independen dinilai tidak bisa bersikap objektif, dan datang dengan asumsi dan gambaran subjektif mereka sendiri: hal ini dapat diperbaiki dengan konsultasi lebih dalam dengan masyarakat.
- » Penilaian garis dasar yang dikembangkan sampai saat ini dikhawatirkan akan gagal menyelesaikan konflik. Mengidentifikasi dampak negatif dan merundingkan solusi yang disepakati melalui PADIATAPA yang tepat sangat diperlukan.
- » Menggunakan pendekatan audit, seperti yang digunakan untuk sertifikasi, untuk melakukan penilaian, tidak akan berhasil.
- » Sangat penting untuk memastikan tidak ada konflik kepentingan, dan bahwa penilai independen, verifikator pihak ketiga, dan mediator bersifat independen dan objektif.

HAK ATAS TANAH PERLU DIJELASKAN TERLEBIH DAHULU

- » Survei cepat/quick surveys dikhawatirkan tidak akan mengidentifikasi batasan hak adat, karena sebagian besar tidak terdaftar atau diakui oleh pemerintah.
- » Di beberapa daerah, terutama Toba Batak, hak dan klaim atas hak adat tumpang tindih di antara banyak kelompok patrilineal/marga; hal tersebut membutuhkan keterlibatan partisipatif dengan masyarakat dan tidak dapat dipahami apalagi diverifikasi dalam beberapa jam atau hari.
- » Pemetaan partisipatif dengan komunitas melalui proses yang inklusif diperlukan dan temuan perlu ditriangulasi melalui berbagai bukti dan sumber.

PADIATAPA ADALAH KUNCI

- » Ada terlalu banyak contoh proses persetujuan palsu yang mengakibatkan orang menjadi korban lebih lanjut.
- » Proses PADIATAPA harus benar-benar selaras dengan prinsip penentuan nasib sendiri.
- » Representasi mandiri tampaknya tidak dipahami oleh perusahaan atau penilai independen.
- » Penilai independen, verifikator pihak ketiga, dan pegawai perusahaan perlu pelatihan dalam PADIATAPA agar selaras dengan persyaratan FSC.

RESTITUSI

- » Lanskap yang telah sangat berubah, orang-orang telah dipindahkan atau bermigrasi dan mengubah cara hidup mereka, sehingga perbaikan tidak bisa berarti mengembalikan apa yang ada sebelumnya tetapi menemukan solusi yang sesuai dengan kondisi dan aspirasi saat ini.

KELOMPOK 1

BALLROOM 1A

Fasilitator : Patrick Anderson

Rapporteur : Rudiansyah

Mohon jabarkan 3 pesan utama dari grup yang harus ditekankan dalam laporan kembali ke pleno:

1. Penjelasan yang lebih mendalam diperlukan mengenai proses Perbaikan dalam kerangka kerja FSC, definisi perbaikan harus dijelaskan lebih lanjut, terutama terkait dengan siapa yang memiliki hak (identifikasi Pemegang Hak yang Terkena Dampak, Pemegang Hak yang Terpengaruh).
2. Selalu ada perkembangan yang baik dan berjalan untuk kerja-kerja proses Remedy FSC APRIL kedepan.
3. Perlu keterlibatan adat dan budaya dari setiap proses perbaikan
4. Program-program sosial dan tenaga kerja

Pertanyaan #1:

Berdasarkan presentasi pagi ini, apa yang dipelajari? Serta hal-hal apa yang menjadi perhatian dan pertanyaan bagi Anda?

- » Masyarakat berharap mereka dapat bekerja sama dengan lebih baik di masa depan.
- » APRIL dapat mengembangkan bisnis yang melibatkan masyarakat dengan produk hutan non-kayu.
- » APRIL harus dapat mendukung dan mengembangkan budaya (pendidikan muatan lokal di sekolah dan pengetahuan untuk generasi mendatang).
- » Penguatan dan melibatkan lembaga adat dan budaya.
- » Butuh penjelasan lebih lanjut dalam proses Perbaikan, definisi perbaikan perlu dijelaskan lebih lanjut.
- » Pola pendekatan dan komunikasi perusahaan kepada masyarakat dilakukan melalui kepala desa dan tokoh adat, ini adalah prosedur yang dilakukan.
- » Pertanyaan mengenai Hak Masyarakat Adat perlu klasifikasi dan penjelasan lebih lanjut, misalnya di Riau ada perbedaan hak masyarakat di laut, pantai, dan daratan.
- » Niat baik APRIL untuk melaksanakan dan mewujudkan komitmen perbaikan lingkungan dan sosial ini harus disambut dengan baik.
- » Proses Perbaikan harus dilakukan secara wajar, baik dari segi sosial maupun lingkungan.
- » Harapan agar semua pihak dapat mendukung keberhasilan proses Perbaikan FSC yang dilakukan oleh APRIL.

<p>Pertanyaan #1: Berdasarkan presentasi pagi ini, apa yang dipelajari? Serta hal-hal apa yang menjadi perhatian dan pertanyaan bagi Anda?</p>	<ul style="list-style-type: none"> » Proses perbaikan yang telah dilakukan APRIL dalam kerangka kerja FSC, ini perlu diverifikasi. » Perbaikan yang dilakukan APRIL dalam kerangka kerja FSC menimbulkan banyak pertanyaan dan pemahaman baru, ini penting untuk diklarifikasi dan juga harus diimplementasikan, dan dijalankan. » Implementasi perbaikan harus sesuai dengan kebutuhan dan keinginan nyata masyarakat. » Pemahaman dan peningkatan kapasitas mengenai kerangka kerja perbaikan FSC kepada masyarakat harus diadakan di desa-desa
<p>Pertanyaan #2: Apa yang ingin anda lihat sebagai hasil dari proses perbaikan ini?</p>	<ul style="list-style-type: none"> » Apa yang diinginkan perusahaan adalah agar mereka dapat terus bekerja secara berkelanjutan, sementara masyarakat juga bisa sejahtera dari segi ekonomi, lingkungan, dan budaya. » Adanya keseimbangan antara semua aspek: ekonomi, alam, dan sosial. » Adanya kenyamanan bagi semua pihak, baik masyarakat maupun perusahaan. » Proses perbaikan terus dilakukan dengan melibatkan lembaga-lembaga adat. » APRIL selalu mendukung hal-hal yang berkaitan dengan adat istiadat, budaya, sosial, dan ekonomi masyarakat. » Menghentikan perselisihan antara perusahaan dan masyarakat. » Selalu ada pengembangan yang berkelanjutan untuk proses kerja perbaikan di masa depan. » Komitmen perusahaan untuk selalu tumbuh dan berkembang bersama masyarakat. » Komitmen perusahaan untuk selalu melakukan pendekatan yang intensif dan lebih baik kepada masyarakat di masa yang akan datang.
<p>Pertanyaan #3: Apa yang diperlukan agar hasil-hasil tersebut terjadi?</p>	<ul style="list-style-type: none"> » Program-program sosial harus memberikan dampak yang signifikan dan dapat dinikmati oleh masyarakat. » Masyarakat berharap agar perusahaan dapat memprioritaskan tenaga kerja dari masyarakat setempat. » Perusahaan berharap dapat menyelesaikan masalah status hak atas tanah, agar tidak terjadi sengketa antara masyarakat atau pihak lain di lapangan di kemudian hari, kepastian tentang pemilik hak dan batas-batasnya harus menjadi hal yang penting. » Kedepannya, jika ada program-program sosial, sebaiknya tidak diberikan dalam bentuk uang tunai.

Catatan lain atau rekomendasi:

Aspek lingkungan dari perhutanan sosial atau di mana masyarakat tinggal, juga dapat menjadi area perbaikan/restorasi.

KELOMPOK 2

Fasilitator : Marcus Colchester

Rapporteur : Lan Mei

Mohon jabarkan 3 pesan utama dari grup yang harus ditekankan dalam laporan kembali ke pleno:

1. Hampir semua anggota kelompok ini menyampaikan bahwa forum ini membantu mereka dalam memperoleh pengertian yang lebih dalam tentang Kerangka Kerja Perbaikan FSC, namun mereka masih membutuhkan waktu untuk mendalami lebih jauh proses ini. Sebenarnya forum ini sangat bermanfaat, namun memunculkan kebingungan karena meski belum banyak kegiatan yang mendukung peningkatan kapasitas terkait proses Kerangka Kerja Perbaikan, proses untuk menentukan garis dasar sudah dimulai. Muncul kekhawatiran terlepas dari kejelasan bahwa LSM lokal memiliki peran penting dalam mendukung masyarakat untuk lebih memahami dan menggunakan hak mereka dalam proses ini, diketahui jelas adanya kebutuhan dana dan belum tersedianya dana untuk mendukung kegiatan ini.
2. Ada kesepakatan bahwa situasi di Indonesia pada tingkat tapak rumit; sebagian masyarakat meminta lahan mereka dikembalikan, sebagian menyambut kegiatan perusahaan sebagai jalan untuk perbaikan ekonomi lokal mereka. Juga terdapat berbagai kelompok masyarakat adat dengan kebiasaan dan budaya yang berbeda-beda. Penting bagi tim penilai independen untuk menyediakan waktu lebih banyak untuk memahami situasi di tingkat tapak, dan mereka perlu memastikan bahwa mereka berbicara dengan perwakilan dari kelompok yang berbeda-beda termasuk pemuda dan perempuan dan bukan terbatas dengan para kepala desa. Hal ini juga sangat penting untuk mencapai perbaikan yang efektif – harus menghargai partisipasi dan hak PADIATAPA masyarakat (bukan hanya golongan elit saja) seperti pemahaman dengan dasar hukum internasional; harus mengetahui apa yang sebenarnya masyarakat inginkan sebagai Perbaikan dan harus berbicara dengan semua anggota masyarakat.
3. Banyak anggota kelompok menyampaikan bahwa agar proses Kerangka Kerja Perbaikan ini dapat berjalan, musti ada kepercayaan di antara para pihak. Ini berarti adanya transparansi di keseluruhan proses, sebagai contoh adanya mekanisme yang dapat memberikan informasi terkini secara transparan tentang kemajuan dari implementasi Kerangka Kerja Perbaikan. Ini juga berarti bahwa semua pihak sedianya terlibat dalam memutuskan dan menyetujui kegiatan-kegiatan yang perlu dilakukan dalam proses ini. Disampaikan usulan untuk membuat panduan praktis bagi tim penilai independen, tim verifikasi pihak ketiga dan masyarakat yang bisa dipakai dalam proses ini. Juga ada usulan untuk membangun mekanisme komunikasi untuk menyempurnakan dan memfasilitasi komunikasi para pihak

dalam proses ini. Alhasil, diperlukan kepercayaan agar terjadinya negosiasi yang efektif untuk mencapai persetujuan tentang perbaikan.

4. Anggota kelompok berharap hasil dari proses ini adalah pengakuan terhadap hak-hak masyarakat – kepemilikan terhadap lahan (dan hutan) mereka diakui, dan mereka dapat memiliki jaminan penghidupan. Ini bukan atinya semata-mata memperoleh pekerjaan di Perusahaan, namun memiliki akses terhadap lahan mereka dan sumber daya untuk terlibat dalam kegiatan adat yang menjadi sumber kehidupan bagi mereka. Penting juga bagi Perusahaan untuk bekerja dengan Pemerintah agar memungkinkan diakuinya hak atas lahan masyarakat hukum adat.

Pertanyaan #1:

Berdasarkan presentasi pagi ini, apa yang dipelajari? Serta hal-hal apa yang menjadi perhatian dan pertanyaan bagi Anda?

- » Kami memiliki pemahaman yang lebih baik tentang Kerangka Kerja Perbaikan FSC.
- » Kami masih membutuhkan waktu untuk mempelajari lebih jauh agar memahami dengan rinci proses Kerangka Kerja Perbaikan ini.
- » Pandangan dari Tim Penilai Independen: mendapatkan masukan dari peserta terkait perlunya penyempurnaan dalam proses penilaian. Sudah memulai proses penilaian garis dasar untuk aspek sosial dan lingkungan di wilayah PT TPL di Sumatra Utara, yang merupakan wilayah yang rumit dengan 12 kabupaten dan lebih dari 150 desa.
- » Pandangan dari lembaga masyarakat adat: selalu memberi perhatian untuk memastikan masyarakat dapat berpartisipasi. Kami berharap masyarakat adat dapat terlibat. Kami khawatir hanya golongan elite yang terlibat. Kami ingin memastikan seluruh anggota kami, termasuk perempuan (yang mengalami dampak spesifik) dilibatkan. Masyarakat adat, jika mereka memiliki kesempatan ingin memperbaiki wilayah mereka; sebagai contoh mendapatkan kembali hutan keramat. Tempat-tempat tersebut sulit untuk diidentifikasi tetapi kita harus berupaya untuk mengembalikannya ke mereka. Untuk area yang belum mengalami deforestasi, kita harus menjaga dan melindunginya. Semoga kita bisa menindaklanjuti penerapan UNDRIP (proses pemerintah untuk pengakuan masyarakat adat rumit).
- » Pandangan dari akademisi: kita harus memiliki kesamaan dalam melihat masyarakat yang terdampak. Sebelum tahun 2000, ada 2 jenis desa – desa yang mengikuti batas alam sepanjang tepian sungai, dan juga desa teritorial yang mulai dibangun sejak tahun 1960an karena adanya transmigrasi dari kota. Desa migrasi didasarkan pada gambar. Juga ada di luar itu, yaitu desa pedalaman, yang kita kenal dengan masyarakat adat, dan kemudian kita menyebutnya masyarakat tradisional, dan sekarang disebut masyarakat adat pedalaman. Terkadang pemerintah mengabaikan mereka. Dari konteks ini, kita perlu menentukan siapa sasarannya. Banyak desa tidak memiliki akses untuk bersuara, maka kita perlu datang ke desa. Kita perlu berhati-hati dalam mendefinisikan desa dan apa yang ingin kita lakukan di sana dalam kaitan dengan proses perbaikan. Kadang masyarakat menjual lahannya kepada orang luar. Kita harus menggunakan pendekatan kualitatif, dan tinggal di desa untuk memahami budaya mereka. Kami menghargai usaha perusahaan.

<p>Pertanyaan #1: Berdasarkan presentasi pagi ini, apa yang dipelajari? Serta hal-hal apa yang menjadi perhatian dan pertanyaan bagi Anda?</p>	<ul style="list-style-type: none"> » Sekarang memahami bawah ada Kerangka Kerja Perbaikan FSC untuk mensertifikasi kayu untuk dijual di luar negeri. Kami melihat ada upaya yang perlu dilakukan perusahaan, dan ada hal-hal yang mereka tidak bisa lakukan lagi. Konflik tenurial sudah terjadi sejak lama. Setelah masyarakat menjual lahannya ke perusahaan, lahan yang sama dapat diperjualbelikan lagi dan menjadi tidak ekonomis bagi perusahaan membeli lahan yang sama berulang-ulang. Belum cukup mempelajari untuk dapat mengatakan bagaimana kita dapat menyelesaikan permasalahan ini. Beberapa masyarakat belum dapat merasakan perubahan kualitas hidup dari keberadaan perusahaan beroperasi di sana (contoh: Adindo Kalimantan Utara), maka mereka menolak Kerangka Kerja Perbaikan karena mereka tidak mengalami perubahan. » Memiliki banyak pengetahuan baru tentang Kerangka Kerja Perbaikan. Memberikan perhatian terhadap apa yang sudah terjadi hingga saat ini dan apa yang perlu dilakukan. Kami berharap kehidupan masyarakat setempat dan hak-hak mereka di mana aktivitas bisnis berlangsung dapat diperbaiki. Berharap keberadaan perusahaan memberi kontribusi positif kepada masyarakat. » Banoa Baru – kehidupan mereka miskin, berbeda dari kehidupan desa transmigrasi di dekat mereka, hidup dari gaji bulan ke bulan. Berharap tim penilai independen tidak hanya berdiskusi dengan pemimpin masyarakat tetapi juga turun ke masyarakat untuk berbicara dengan pemuda dan perempuan. Sebagian masyarakat terbagi-bagi. » Memiliki pengertian yang lebih lengkap tentang Kerangka Kerja Perbaikan FSC. Apa yang disampaikan lebih rinci dari prosedur remediasi untuk kelapa sawit. Jika PADIATAPA tidak diberikan, bagaimana batas untuk dapat berasosiasi lagi bisa dicapai untuk implementasi awal? » Merasa bahwa Tim Keberlanjutan APRIL serius. Hanya melihat kenyataan adanya keterlambatan panjang dalam aspek peningkatan kapasitas dan pelatihan (tentang apa FSC, Kerangka Kerja Perbaikan dan peran dari Tim Penilai Independen). Proses ini belum mulai namun kegiatan tim penilai independen sudah berjalan, dan sudah ada permasalahan sehingga ini menimbulkan kebingungan seputar prosedurnya. Akan baik jika proses di Riau dan Kaltim bisa mengambil jeda dahulu untuk mengklarifikasi prosedur yang digunakan.
<p>Pertanyaan #2: Apa yang ingin anda lihat sebagai hasil dari proses perbaikan ini?</p>	<p>[pertanyaan tentang prosedur perbaikan RSPO dan bagaimana penerapannya]</p> <ul style="list-style-type: none"> » RSPO RaCP memiliki dua aspek – pertama memungkinkan perbaikan di area lain; dan yang satunya memungkinkan untuk perbaikan terhadap pelanggaran HAM dan membuat area HCV 4 – 6 pada area yang terdampak – hingga saat ini, ada beberapa perusahaan yang mengikuti salah satu prosedur saja. » AMAN tidak setuju dengan pilihan tersebut, karena serupa dengan perdagangan karbon. Restorasi dari area yang rusak adalah bagus. Lembaga dan masyarakat ada ketika mendukung program karbon tidak mendapat tanggapan dari pihak lainnya. Perlu berkolaborasi dengan masyarakat adat untuk melihat area mana yang mereka inginkan untuk restorasi dan apa yang mereka inginkan.

<p>Pertanyaan #2: Apa yang ingin anda lihat sebagai hasil dari proses perbaikan ini?</p>	<ul style="list-style-type: none"> » 3 harapan: perlu percaya satu sama lain antara perusahaan, masyarakat, masyarakat sipil, akademisi dan konsultan. Semoga proses ini membangun kepercayaan. Kedua perlunya mekanisme yang transparan untuk mengikuti kemajuan Kerangka Kerja Perbaikan. Ketiga, implementasi dari proses yang cukup. » Masyarakat adat yang berbeda-beda bisa menimbulkan pengertian yang berbeda, maka langkah pertama adalah membangun kepercayaan. Kepercayaan akan berujung pada keterbukaan, sosialisasi maka kemudian kerangka kerja perbaikan dapat diterapkan. » Kita perlu menyelaraskan apa yang perusahaan lakukan dengan program Pemerintah. » Masyarakat memerlukan area untuk penghidupan mereka sendiri sehingga mereka tidak perlu dipekerjakan oleh Perusahaan (dimana mereka berpenghasilan kecil dan memiliki posisi rendah). » Ingin melihat kerangka kerja yang memperbaiki kesejahteraan masyarakat. Kita perlu melibatkan pemangku kepentingan dan membicarakannya bersama-sama. » Bisnis penting bagi kesejahteraan masyarakat. Perlu kolaborasi antara pemangku kepentingan, FSC, APRIL, masyarakat untuk mencapai kesepakatan yang berkeadilan dan resolusi yang layak. » Berharap perusahaan dapat merestorasi area dan hutan untuk mengembalikan kondisinya agar bisa digunakan untuk agroforestri. Berharap ada prosedur yang memungkinkan hak atas lahan di dalam konsesi. Berharap perusahaan bekerja sama dengan Pemerintah untuk pengakuan hak lahan masyarakat seperti hutan adat, hutan desa. Perusahaan bukan hanya menghormati hak masyarakat tetapi juga bekerja dengan Pemerintah sehingga hak-hak tersebut diakui.
<p>Pertanyaan #3: Apa yang diperlukan agar hasil-hasil tersebut terjadi?</p>	<ul style="list-style-type: none"> » Masyarakat menurunkan egonya sehingga perbaikan dapat tercapai. Jika kedua pihak tidak saling memahami, maka akan menemui jalan buntu dan tidak tercapai kesepakatan. APRIL dapat menyediakan lebih banyak waktu bersama masyarakat untuk memiliki hubungan yang lebih kuat yang akan membantu dalam proses negosiasi. » Perlu kolaborasi perusahaan, masyarakat, semua pemangku kepentingan. Perlu saling bekerja sama sehingga tidak ada perdebatan mengapa melakukan X atau Y, tetapi upaya yang diambil sudah disepakati semua pihak. » Harus menghormati kepemilikan masyarakat terhadap hutan dan bekerja sama untuk meningkatkan ekonomi masyarakat. » APRIL perlu mengidentifikasi pemangku kepentingan yang tepat, dan setelah itu mengidentifikasi siapa yang bisa memfasilitasi dan memediasi antara masyarakat dan perusahaan. » Kita perlu melibatkan seluruh elemen masyarakat, karena ini untuk kesejahteraan mereka. Perlu melihat perbaikan seperti apa yang diinginkan, dari semua kelompok masyarakat. Kedua, perlu belajar dari perusahaan lain yang gagal. » Kita perlu bekerja keras, serius, terbuka dan percaya satu sama lain. Ada banyak harapan, kita tidak dapat mundur dan perlu melihat apa yang perlu didiskusikan dan bertanya kepada masyarakat apa yang benar-benar mereka butuhkan.

Pertanyaan #3:

Apa yang diperlukan agar hasil-hasil tersebut terjadi?

- » Membuat mekanisme komunikasi antar pemangku kepentingan, kita dapat menggunakan beberapa jenis forum, platform digital hingga membangun dan memperbaiki komunikasi. Kedua, kita bisa membuat petunjuk teknis praktis yang relevan bagi tim penilai independen, tim verifikasi pihak ketiga dan masyarakat sehingga ada referensi yang telah disepakati dan dirujuk bersama.
- » Jika kita ingin LSM di Indonesia mendukung masyarakat dalam proses ini, kita butuh pendanaan. FSC berharap pelatihan dan peningkatan kapasitas dapat didukung LSM. Hal ini sudah diangkat kepada FSC tetapi belum ada hasilnya. Perusahaan sudah juga mengatakan dapat berkontribusi terhadap hal ini tapi juga belum terwujud. Ini penting jika kita ingin LSM memiliki peran dalam proses.

Catatan lain atau rekomendasi:

Refleksi tambahan dari fasilitator dan rapporteur:

KELOMPOK 3

MEETING ROOM B

Fasilitator : Cindy Cheng

Rapporteur : Michelle Chan

Mohon jabarkan 3 pesan utama dari grup yang harus ditekankan dalam laporan kembali ke pleno:

1. Penekanan utama adalah pada kompleksitas lanskap sosial dan masyarakat yang berbeda di Indonesia, serta banyaknya klaim yang berbeda atas tanah adat. Kesimpulan utamanya adalah keinginan untuk mengakhiri semua konflik sosial yang terus berlanjut. Proses perbaikan memberikan sebuah peluang namun saat ini sistem tersebut tidak memadai atau tidak berjalan cukup jauh dalam hal penilaian independen, dan ada kekhawatiran bahwa, tanpa proses yang jelas dan terperinci, proses Perbaikan akan menciptakan lebih banyak masalah meskipun ada niat baik.
2. Identifikasi dan verifikasi yang tepat adalah kuncinya. Perlunya mengidentifikasi komunitas-komunitas yang relevan dengan tepat, karena ada kekhawatiran besar mengenai komunitas atau masyarakat adat mana yang mengalami dampak negatif. Verifikasi yang tepat mencakup perumusan tentang apa yang dimaksud dengan komunitas, dan dari siapa data dikumpulkan. Hal ini mencakup penilaian faktual tidak hanya terhadap para pemangku kepentingan yang terkena dampak secara keseluruhan namun juga berbagai jenis, status, dan pihak-pihak yang memiliki jumlah sumber daya yang berbeda-beda. Hanya berbicara dengan kepala desa saja tidak cukup, perlu mempertimbangkan seluruh lapisan masyarakat agar desa lain dapat berpartisipasi secara nyata.
3. Hal penting yang terakhir adalah perlunya keterlibatan pemerintah. Pemerintah mengeluarkan lisensi dan izin konsesi atau mengakui masyarakat adat, dan merupakan pemain kunci dalam penyelesaian konflik. Ada juga kekhawatiran jika peraturan pemerintah berubah, maka proses penyelesaiannya akan terkena dampaknya. Pemerintah juga mempunyai kewenangan untuk memfasilitasi dan perlu dilibatkan.

<p>Pertanyaan #1: Berdasarkan presentasi pagi ini, apa yang dipelajari? Serta hal-hal apa yang menjadi perhatian dan pertanyaan bagi Anda?</p>	<p>» Kekhawatiran utama adalah berlanjutnya konflik sosial antar masyarakat. Ada kekhawatiran akan perambahan lahan, karena beberapa masyarakat mengaku sebagai kmasayrakat adat atau mengaku telah mengalami pelanggaran hak asasi manusia namun menolak perusahaan untuk melakukan penanaman kembali hutan atau melakukan pelanggaran sendiri. Hal ini diperparah dengan izin pemerintah yang diberikan kepada masyarakat adat yang tidak menyebutkan secara pasti wilayah atau lokasinya. Penting untuk dilakukan verifikasi yang tepat mengenai pemilik sebenarnya dari tanah di kawasan tersebut, pihak yang memegang hak, dan pihak yang dirugikan.</p>
<p>Pertanyaan #2: Apa yang ingin anda lihat sebagai hasil dari proses perbaikan ini?</p>	<p>» Dari proses Perbaikan ini, semua orang ingin konflik sosial diakhiri. Selain itu, Perbaikan perlu diterapkan di berbagai sektor, termasuk kelapa sawit.</p>
<p>Pertanyaan #3: Apa yang diperlukan agar hasil-hasil tersebut terjadi?</p>	<p>» Untuk mencapai hasil tersebut, kita memerlukan kemauan yang kuat untuk mengakhiri semua konflik sosial dan generasi berikutnya akan menderita akibat yang sama. Selain itu, peningkatan keterlibatan dengan pemerintah dan pemetaan pemangku kepentingan yang lebih baik, serta perlu melibatkan lapisan masyarakat. Kita tidak bisa hanya fokus pada kepala desa saja, tapi juga harus memperhitungkan lapisan sosial. Mempersiapkan sistem metodologi, penilaian independen dan Padiatapa yang lebih baik.</p>

Catatan lain atau rekomendasi:

Refleksi tambahan dari fasilitator dan rapporteur:

KELOMPOK 4

BALLROOM 1B

Fasilitator : Dian Novarina

Rapporteur : Vina Surya

Mohon jabarkan 3 pesan utama dari grup yang harus ditekankan dalam laporan kembali ke pleno:

1. Mendukung proses perbaikan APRIL - FSC namun menekankan bahwa hak masyarakat harus diberikan
2. Impelentasi di lapangan harus benar-benar dijalankan

<p>Pertanyaan #1: Berdasarkan presentasi pagi ini, apa yang dipelajari? Serta hal-hal apa yang menjadi perhatian dan pertanyaan bagi Anda?</p>	<ul style="list-style-type: none">» Mendapatkan wawasan mengenai proses perbaikan sosial, budaya dan lingkungan FSC - APRIL» Mendukung keberadaan perusahaan» Harapan masyarakat bisa sejalan dengan harapan perusahaan dan dapat hidup berdampingan, penyelarasan program antara perusahaan dan masyarakat sekitar» Keinginan untuk menjaga kearifan masyarakat sesuai UU No. 50 dan menjaga hak masyarakat hukum adat» Kurang membahas hak-hak hubungan kerja, kesejahteraan, dan jaminan sosial. kekhawatiran praktik tidak sejalan dengan UU Cipta Kerja
<p>Pertanyaan #2: Apa yang ingin anda lihat sebagai hasil dari proses perbaikan ini?</p>	<ul style="list-style-type: none">» Terus berjalan.» Salah satu contoh harapan: untuk dilakukan konservasi sebagai laboratorium hidup bagi masyarakat dan keturunan kedepan» Program perbaikan betul-betul dijalankan di lapangan» Tidak ada lagi hubungan kerja yang melanggar UU Cipta Kerja, upah dibawah UMR, harus diikutsertakan BPJS TK dan Kesehatan» Tidak ada lagi pencemaran sungai yang mengganggu mata pencarian masyarakat

Pertanyaan #3:

Apa yang diperlukan agar hasil-hasil tersebut terjadi?

- » Perusahaan harus terbuka dan peduli kepada masyarakat
- » Melakukan kerja bersama untuk pengelolaan sungai, dituangkan dalam bentuk kemitraan agar saling bertanggung jawab
- » Duduk bersama untuk menyatukan visi ke depan, pendampingan & pelatihan dari perusahaan demi kesejahteraan masyarakat
- » Kerjasama yang solid antara perusahaan dan masyarakat untuk pengelolaan sungai agar tidak tercemar, pelestarian lingkungan
- » Komunikasi dan koordinasi yang baik antara pemerintah, perusahaan, dan masyarakat
- » Menjalankan aturan ketenagakerjaan sesuai UU Cipta Kerja dan kerjasama yang baik kedepan
- » Terciptanya komunikasi dan kerjasama yang baik antara perusahaan dan serikat pekerja

Catatan lain atau rekomendasi:

Kejelasan dari pemerintah terhadap status lahan masyarakat di kawasan hutan

Refleksi tambahan dari fasilitator dan rapporteur:

KELOMPOK 5

BALLROOM 3A

Fasilitator : Aditya Bayunanda

Rapporteur : Kokok Yulianto

Mohon jabarkan 3 pesan utama dari grup yang harus ditekankan dalam laporan kembali ke pleno:

1. Keadilan sosial, ekonomi & lingkungan harus seimbang.
2. Area perbaikan tambahan harus lebih dari yang diwajibkan.
3. Proses konsultasi pemangku kepentingan juga harus di tingkat lanskap (contoh: lebih dalam tentang kerusakan teknis, dampak negatif, juga tentang implementasi PADIATAPA).

Pertanyaan #1:

Berdasarkan presentasi di pagi hari, apa yang dipelajari? Serta hal-hal apa yang menjadi perhatian dan pertanyaan bagi Anda?

A: Canakya:

- » Kriteria keberhasilan harus saling menguntungkan.
- » Pihak-pihak yang terkena dampak tidak cukup dilibatkan.
- » PADIATAPA (Peretujuan atas dasar informasi di awal tanpa paksaan) belum sepenuhnya diterapkan.

B: Dejan

- » Dari presentasi tersebut, terlihat jelas bahwa ada banyak hal yang perlu dilakukan, untungnya, timeline-nya sudah tersedia.
- » PADIATAPA dapat dimulai dari awal untuk transparansi yang lebih baik.
- » Bagaimana perusahaan akan mempersiapkan diri untuk implementasinya?
- » Dalam hal lingkungan, ada fokus pada konservasi dan restorasi.
- » AB: Ada perbedaan bobot untuk konservasi dan restorasi.
- » AB: Sebagai contoh, habitat gajah tidak membutuhkan 100% hutan yang utuh, tetapi habitat yang bervariasi selalu menjadi bagian dari habitat gajah.

C: Hairul

- » Keadilan untuk aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan harus seimbang.

<p>Pertanyaan #1: Berdasarkan presentasi di pagi hari, apa yang dipelajari? Serta hal-hal apa yang menjadi perhatian dan pertanyaan bagi Anda?</p>	<p>D: Petrus</p> <ul style="list-style-type: none"> » Apa yang dimaksud dengan perbaikan versi FSC? Apakah 1:1? Apa nilainya? Atau haruskah seseorang mengajukan permohonan izin RE hingga rasio 1:1? » AB: Untuk aspek sosial, selama PADIATAPA digunakan secara adil dan benar, hasilnya akan saling menguntungkan. » AB: Untuk aspek lingkungan, skema RACP dari RSPO tidak bisa diadopsi, karena yang akan dinilai adalah keberhasilan mengembalikan nilai lingkungan yang direduksi oleh perusahaan, dan selain itu juga harus melampaui persyaratan wajib. <p>E: Darwis</p> <ul style="list-style-type: none"> » APRIL dilaporkan tidak terburu-buru dalam melakukan proses perbaikan, namun kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa APRIL terlihat terburu-buru dengan tidak melakukan kunjungan lapangan karena keterbatasan waktu. » AB: Jika penilai independen dipekerjakan oleh FSC dengan tenggat waktu yang ditentukan, intinya APRIL tidak boleh terburu-buru. » Petrus: Tidak terburu-buru tetapi juga tidak menunda-nunda yang tidak perlu. Hal ini dapat memakan waktu jika ada alasan yang masuk akal dalam jangka waktu tersebut dan jika perusahaan memiliki kapasitas ekonomi yang memadai untuk itu. <p>F: Mawar</p> <ul style="list-style-type: none"> » Penilai independen ditargetkan untuk menerima kontrak selama 3 bulan, dengan kemungkinan perpanjangan berdasarkan perkembangan di lapangan. » Proses PADIATAPA harus dilaksanakan. » Apa yang akan menjadi kelanjutan dari penilaian garis dasar oleh verifikator pihak ketiga penilai independen?
<p>Pertanyaan #2: Apa yang ingin anda lihat sebagai hasil dari proses perbaikan ini?</p>	<p>Hairul:</p> <ul style="list-style-type: none"> » Strategi untuk mencapai tujuan perbaikan di tempat yang berbeda harus mempertimbangkan karakteristik masing-masing lokasi dan tidak bisa diseragamkan. <p>Petrus:</p> <ul style="list-style-type: none"> » Hal ini untuk mengatasi kekurangan pemerintah dalam melindungi hutan/habitat (contoh: TN Tesso Nilo). » Siapa yang harus menerima manfaatnya? Misalnya, masyarakat penanam hutan. <p>Canakya:</p> <ul style="list-style-type: none"> » PADIATAPA harus melibatkan kepedulian lebih lanjut terhadap masyarakat yang terkena dampak untuk mencari manfaat bersama. » Mengapa tidak berbuat lebih banyak jika memungkinkan? Mengapa harus puas dengan rasio 1:1 jika rasio 1:2 bisa dicapai?

Pertanyaan #3:

Apa yang diperlukan agar hasil-hasil tersebut terjadi?

Hairul:

- » Kesejahteraan hanya bisa dicapai jika ada keseimbangan dalam aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan.

Petrus:

- » Menguntungkan perusahaan untuk mendapatkan keuntungan untuk melanjutkan proses perbaikan.

Dejan:

- » Jika penilaian garis dasar bisa ditentukan seakurat mungkin, langkah ke depan akan lebih mudah.

Catatan lain atau rekomendasi:**Refleksi tambahan dari fasilitator dan rapporteur:**

Pemangku kepentingan (berminat, terpengaruh, terdampak) membutuhkan pengembangan kapasitas dan pengetahuan tentang bagaimana proses kerangka kerja perbaikan berjalan/ diberlakukan.

KELOMPOK 6

BALLROOM 3B

Fasilitator : Muhammad Ali Imron

Rapporteur : Dito Akbar

Mohon jabarkan 3 pesan utama dari grup yang harus ditekankan dalam laporan kembali ke pleno:

1. Penilaian garis dasar lingkungan dan sosial harus dikembangkan dengan metodologi yang kuat sehingga manfaat timbal balik bagi lingkungan dan masyarakat dapat dipastikan dapat dipulihkan.
2. Memastikan semua orang memahami proses perbaikan.
3. Adanya harmonisasi antara pemerintah, LSM, akademisi, perusahaan dan sektor lain yang bertujuan untuk perbaikan lingkungan.

<p>Pertanyaan #1: Adakah seharusnya advokasi dari FSC untuk menjelaskan dalam penggunaan yang ada terhadap suatu project mengenai benefit yang ada dalam project tersebut?</p>	<p>» Harus ada advokasi dari FSC terhadap proyek atau perbaikan tersebut, dengan tujuan untuk mendapatkan kejelasan dari aspek keuangan dan aspek lainnya.</p>
<p>Pertanyaan #2: Sejauh mana APRIL dan FSC dapat menemukan pemegang izin dalam memberikan izin untuk melakukan prosesnya? Serta sejauh mana dapat dilakukan, baik daerah dan kegiatannya?</p>	<p>» Konservasi tidak memperhitungkan keberadaan masyarakat di dalam kawasan hutan. Hal ini dikarenakan jika kita menjelaskan kegiatan yang berkaitan dengan lingkungan, maka relatif mudah untuk diperbaiki. Namun, dalam konteks sosial akan cukup sulit untuk mendefinisikan ruang lingkup apa yang dapat diperoleh atau perlu dilakukan untuk berkontribusi pada kesejahteraan.</p> <p>» Pelaksanaan lokasi untuk dilakukannya rencana perbaikan dalam perbaikan-perbaikan yang telah dilakukan sebelumnya yang menyebabkan dampak negatif.</p>
<p>Pertanyaan #3: Mandat yang ada akan diberikan kepada siapa?</p>	<p>» Mandat yang dilakukan untuk melakukan komunikasi atau diskusi dengan pemerintah dilakukan oleh FSC Indonesia, selaku perwakilan FSC global.</p>

<p>Pertanyaan #4: Bagaimana cara membuka peluang kerja sama dengan pemerintah?</p>	<ul style="list-style-type: none"> » Adanya perbedaan pandangan yang kerap menyebabkan terjadinya perselisihan, kemudian pemerintah ingin adanya credit ketika melakukan suatu perbaikan lingkungan.
<p>Pertanyaan #5: Apakah persoalannya terhadap bagaimana penerimaan pemerintah?</p>	<ul style="list-style-type: none"> » Kurangnya engagement dari pihak eksternal kepada pemerintah, sehingga kurangnya informasi yang didapatkan dan dapat dijadikan bahan acuan. Kemudian adanya kehausan pada kuasa dan donor support yang berpengaruh dalam sertifikasi. Hal ini akan menyebabkan munculnya mandatory bagi pemerintah untuk segera menyelesaikannya.
<p>Pertanyaan #6: Bagaimana situasi dan dokumen yang menjadi preferensi dalam perbaikan untuk di tahun 1994-tahun yang sudah hilang?</p>	<ul style="list-style-type: none"> » Jika baseline yang digunakan adalah survei wawancara, data yang dihasilkan dapat diragukan kebenarannya. Hal ini dikarenakan adanya perbedaan generasi yang tinggal pada kawasan tersebut. » Akan tetapi, dapat menggunakan peninggalan leluhur yang terdapat pada kawasan tersebut yang bersifat register. » Perubahan-perubahan pada kawasan tersebut akan menyebabkan adanya ketidakjelasan dalam hal perbaikan yang ada.
<p>Pertanyaan #7: Bagaimana perlakuan pada masyarakat adat karena dokumen yang hilang?</p>	<ul style="list-style-type: none"> » Dapat melihat penilaian garis dasar yang harus mencakup utilitas publik, lingkungan, atau pemanfaatan dengan contoh melihat ekologi sekitar yang mendukung kehidupan. » Hak atas tanah dan hak pemanfaatan sebenarnya merupakan hak-hak dasar masyarakat. » Untuk satwa liar, dapat menggunakan wilayah jelajah dan penelitian lebih lanjut.
<p>Pertanyaan #8: Bagaimana implementasi kebijakan untuk perbaikan dalam suatu kawasan atau desa untuk masyarakat? Indikator apa yang digunakan dalam perbaikan tersebut?</p>	<ul style="list-style-type: none"> » Ketika sudah memberikan manfaat kepada masyarakat maka masyarakat harus dapat berkontribusi kepada lingkungan dari manfaat yang telah diperolehnya. » Hubungan antara bisnis dan pemerintah dengan manfaat langsung bagi masyarakat pemegang hak dan lingkungan. Juga harus memastikan tidak ada pihak yang dengan sengaja mengambil keuntungan dari hal tersebut.

Catatan lain atau rekomendasi:

LIST OF MESSAGES/ OPINIONS FOR QUESTIONS NO.1:

Konteks Baseline:

1. Pengambilan baseline yang tidak menggunakan HCV karena dianggap diluar dari baseline, namun dalam presentasi yang dilakukan dan menurut pendapat bahwa seharusnya adanya penggunaan HCV dalam mengambil baseline.
2. Jika garis dasar yang digunakan adalah wawancara maka datanya bisa diragukan, hal ini dikarenakan adanya perbedaan generasi yang tinggal di daerah tersebut.
3. Namun, dapat menggunakan peninggalan nenek moyang di daerah tersebut yang berfungsi sebagai register.
4. Perubahan pada daerah tersebut dapat mengakibatkan ketidakpastian dalam hal perbaikan.
5. Dapat melihat garis dasar yang mencakup utilitas publik, lingkungan, atau pemanfaatan, misalnya dengan melihat ekologi sekitar yang mendukung kehidupan.

Konteks lokasi:

1. Perbaikan di dalam Taman Nasional dapat dianggap sebagai tambahan, dengan alasan manfaat atau tujuan yang lebih sedikit untuk Taman Nasional.
2. Perbaikan dilakukan di area yang memberikan dampak terhadap lingkungan dan sosial antara tahun 1994 - 2020, oleh karena itu dapat bersifat sukarela dan juga dapat menjadi bagian dari penerimaan dari pemerintah dalam inisiatif tersebut.
3. Tidak boleh ada organisasi atau perusahaan yang mengambil keuntungan dengan tujuan untuk keuntungan pribadi.
4. APRIL harus melaksanakan perbaikan di areanya sendiri atau di area lain dengan mempertimbangkan konektivitas, atau bisa juga di Taman Nasional.
5. Global Forest World mengungkapkan data bahwa pengembangan lahan gambut di Riau mencapai 1 juta hektar, namun belum dilakukan secara komprehensif dan terintegrasi.

Konteks perbaikan:

1. Kerangka Kerja Perbaikan FSC dapat dianggap sebagai dokumen yang hidup atau dapat diperbarui. Perbaikan tidak hanya harus menyediakan dana tetapi juga harus terlibat dalam kegiatan atau tindakan perbaikan.
2. Mandat untuk melakukan komunikasi atau diskusi dengan pemerintah dipegang oleh FSC Indonesia sebagai perwakilan FSC Global.
3. Keterlibatan pihak eksternal yang terbatas terhadap pemerintah sehingga informasi dan referensi yang didapat hanya sedikit. Kemudian ada juga kehausan akan kekuasaan dan dukungan dari donor yang mempengaruhi sertifikasi. Hal ini membutuhkan pemerintah untuk menyelesaikannya.
4. Perusahaan memiliki prinsip untuk menghasilkan keuntungan dan oleh karena itu ketika melakukan perbaikan lingkungan, pemerintah harus diikutsertakan karena mereka adalah bagian dari penyebab dampak negatif.
5. Ketika memberikan izin, harus ada kejelasan mengenai ekosistem di dalam kawasan serta aspek sosial dan masyarakat di dalamnya.

Konteks pemerintah:

1. Peran pemerintah atau negara sangat diperlukan dalam proses perbaikan, karena kawasan hutan di Indonesia merupakan hutan yang dimiliki oleh negara.
2. Penerimaan dari pemerintah sangat dibutuhkan, terkadang pemerintah memiliki pandangan dan pemahaman yang berbeda.
3. Salah satu yang menjadi perhatian penting adalah bagaimana bekerja sama dengan Pemerintah Indonesia, sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam sebuah negara.
4. Isu lainnya adalah mengenai 'gengsi' dari beberapa pihak, salah satunya adalah pemerintah yang memiliki pandangan bahwa jika sudah ada standar seperti SVLK maka tidak perlu lagi ada FSC.
5. Selama Orde Baru, ketidakpastian dan status quo dalam manajemen dilanjutkan dengan prinsip-prinsip Orde Lama. Hal ini dikarenakan mereka yang belajar di luar negeri tidak kembali ke Indonesia karena perubahan situasi politik.
6. Perbaikan tidak boleh tumpang tindih dengan program pemerintah.

Konteks Komunitas dan Sosial:

1. Dapat melihat garis dasar yang mencakup utilitas publik, lingkungan, atau pemanfaatan, misalnya melihat ekologi sekitar yang mendukung kehidupan.
2. Pengelolaan hutan desa harus dilihat sebagai hutan dan masyarakat yang merusaknya, dengan satu kesepakatan dari masyarakat ketika mereka menginginkan perbaikan.

DAFTAR PESAN/PENDAPAT UNTUK PERTANYAAN NO.2 & NO.3

1. Adanya harmonisasi antara pemerintah, LSM, akademisi, perusahaan dan sektor lain yang bertujuan untuk perbaikan lingkungan.
2. Ada kejelasan dalam prosesnya dengan adanya kemauan dari perusahaan dan kemudian utilitasnya untuk masyarakat. Hal ini merupakan salah satu hal yang mendasar dalam melakukan proses tersebut.
3. Adanya sentimen negatif akibat informasi dan berita penolakan pasar dari negara lain yang membuat kita menciptakan dengan negara asing melalui sertifikasi.
4. Hubungan antara bisnis dan pemerintah yang memiliki manfaat langsung bagi masyarakat pemegang hak dan lingkungan. Juga harus memastikan tidak ada pihak yang sengaja mengambil keuntungan dari hal ini.
5. Penerimaan pemerintah dalam perbaikan yang dilakukan oleh sektor swasta.
6. Ketika sudah memberikan manfaat kepada masyarakat maka masyarakat harus dapat memberikan kontribusi kepada lingkungan dari manfaat yang telah diperolehnya.
7. Semua pihak memahami apa yang dimaksud dengan proses perbaikan agar tidak terjadi kesalahpahaman

Refleksi tambahan dari fasilitator dan rapporteur:

Diskusi berjalan dengan baik, akan tetapi banyaknya waktu yang digunakan dalam mendiskusikan pertanyaan pertama.

KELOMPOK 7

MEETING ROOM C

Fasilitator : Salem Jones

Rapporteur : Daneetha Muniandy

Mohon jabarkan 3 pesan utama dari grup yang harus ditekankan dalam laporan kembali ke pleno:

1. Seluruh proses perbaikan harus transparan di mana informasi tentang keseluruhan alur proses serta substansi alur proses harus tersedia untuk semua
2. Harus ada praktik kesetaraan, transparansi, dan dialog partisipatif di sepanjang proses perbaikan

Pertanyaan #1:

Berdasarkan presentasi pagi ini, apa yang dipelajari? Serta hal-hal apa yang menjadi perhatian dan pertanyaan bagi Anda?

MEMAHAMI

- » Keterlibatan berbagai pemangku kepentingan sebelum dan hingga proses sertifikasi selesai.
- » Terdapat peluang untuk dialog terbuka yang dapat bersifat akomodatif dan konfrontatif.
- » APRIL perlu mengambil pembelajaran dari forum multi-pemangku kepentingan.
- » Pemahaman para pemangku kepentingan tentang Kerangka Perbaikan meningkat dan pandangan terhadap proses ini telah berubah secara positif.
- » Dialog yang digelar dengan para pemangku kepentingan, terutama dengan masyarakat, harus menggunakan istilah-istilah yang lebih sederhana dan mudah dipahami.
- » FSC dan APRIL telah menyampaikan kegiatan yang akan mereka lakukan sebagai bagian dari Kerangka Perbaikan. Namun, tidak ada kejelasan sejauh mana APRIL telah melaksanakan Kerangka Perbaikan tersebut?
- » Ada beberapa pertanyaan dari LSM yang belum dijawab oleh FSC.

KEKHAWATIRAN

- » Perlu adanya keterbukaan dalam menerima pendekatan baru yang dapat memperlancar penyelesaian proses.
- » Revisi terhadap SOP atau prinsip-prinsip yang ada saat ini.
- » APRIL harus memberikan respons cepat terhadap keluhan dari semua pemangku kepentingan.
- » Laporan dari penilai independen.

<p>Pertanyaan #1: Berdasarkan presentasi pagi ini, apa yang dipelajari? Serta hal-hal apa yang menjadi perhatian dan pertanyaan bagi Anda?</p>	<p>PERTANYAAN</p> <ul style="list-style-type: none"> » Perlu adanya proses yang adil dan beralasan untuk memperbaiki dampak negatif yang dialami oleh masyarakat lokal serta masyarakat adat yang terdampak. » Semua pemangku kepentingan menerima pembaruan yang sama tentang proses perbaikan yang sedang berlangsung. » Proses perbaikan harus transparan dan terbuka. » Informasi yang diberikan oleh APRIL adalah komitmen mereka dan sejauh mana mereka telah menjalankan Kerangka Perbaikan, namun, tidak ada kejelasan tentang keterlibatan Penilai Independen dalam proses tersebut. » Bagaimana Penilai Independen atau FSC dapat menentukan kapan analisis sosial dilakukan atau kapan pemangku kepentingan yang terdampak diidentifikasi. » Bagaimana jika laporan yang diajukan oleh APRIL dari Penilai Independen menunjukkan bahwa hanya 70% dari pemangku kepentingan yang terdampak setuju dengan Kerangka Perbaikan dan sisanya tidak siap untuk menjadi bagian dari Kerangka Perbaikan. Apakah FSC akan menerima laporan ini atau apakah FSC memerlukan persetujuan dari 30% pemangku kepentingan yang terdampak tersebut.
<p>Pertanyaan #2: Apa yang ingin anda lihat sebagai hasil dari proses perbaikan ini?</p>	<ul style="list-style-type: none"> » Seluruh pelaksanaan dan proses Kerangka Perbaikan harus transparan. » APRIL belum secara gamblang menyampaikan informasi tentang semua pemasok mereka. Ini adalah informasi penting karena ada beberapa pemasok APRIL yang terlibat dalam deforestasi. » Harapan terhadap Penilai Independen adalah mereka harus terbuka terhadap informasi dari berbagai pihak di sekitar desa/area komunitas yang teridentifikasi. Informasi dari semua pihak juga harus diverifikasi oleh Penilai Independen. » Ketika Rencana Perbaikan telah disepakati, maka harus diwujudkan. » Perlu ada pencapaian tahunan yang ditinjau. » Ada forum/musyawarah multi-pemangku kepentingan di kabupaten yang difasilitasi oleh pihak ketiga (bukan FSC atau APRIL).
<p>Pertanyaan #3: Apa yang diperlukan agar hasil-hasil tersebut terjadi?</p>	<ul style="list-style-type: none"> » Transparansi: APRIL harus menyediakan platform yang dapat diakses publik, terutama bagi para pemangku kepentingan yang terdampak. APRIL juga perlu memiliki SOP untuk memberikan respons jika ada pertanyaan dari pemangku kepentingan melalui platform yang dapat diakses publik ini. Semua pembaruan dan informasi tentang proses perbaikan harus tersedia di platform yang dapat diakses publik ini. » Rencana Perbaikan: Menyusun dan merencanakan pencapaian tahunan secara strategis. » Dialog: Siapa pihak ketiga yang akan mengadakan pertemuan/forum multi-pemangku kepentingan di kabupaten? Pihak yang tepat perlu diidentifikasi.

Catatan lain atau rekomendasi:

Refleksi tambahan dari fasilitator dan rapporteur:

KELOMPOK 8

MEETING ROOM E

Fasilitator : Christopher Burchmore

Rapporteur : Gamma Galudra

Mohon jabarkan 3 pesan utama dari grup yang harus ditekankan dalam laporan kembali ke pleno:

1. Harapan untuk berkolaborasi dan inklusif antara semua pemangku kepentingan, terutama pemerintah dalam kerangka kerja perbaikan
2. Penyelarasan pemahaman dan komunikasi dengan peningkatan kapasitas (semua tingkatan)
3. Kita perlu memberikan waktu untuk proses perbaikan. Kami menyadari bahwa hal ini sangat memakan waktu dan kompleks.

Pertanyaan #1:

Berdasarkan presentasi pagi ini, apa yang dipelajari? Serta hal-hal apa yang menjadi perhatian dan pertanyaan bagi Anda?

- » Belum ada pemahaman yang sama mengenai kerangka kerja FSC. Para pihak memiliki pemahaman yang berbeda; Masih ada kesenjangan antara kerangka kerja dan kebijakan pemerintah. Masih ada perbedaan untuk masyarakat adat, baik yang formal maupun yang diakui.
- » Refleksi tentang bagaimana menyelesaikan hak-hak atas tanah. Perlu mengembangkan alat untuk mengukur apakah berhasil atau tidak. APRIL telah memiliki contoh dan perlu ditiru di tempat lain, tergantung pada konteks lokal. Bagaimana setiap orang mendapatkan informasi. Bagaimana masyarakat dapat menegosiasikan hak-hak atas tanah. Penilai harus memiliki kemampuan untuk memahami isu-isu lokal; penerimaan kesimpulan penilai oleh masyarakat dan proses pengambilan keputusan tentang bagaimana penilai terlibat dalam proses tersebut.
- » Konsultasi tidak dapat dilakukan hanya sekali, terutama mengenai keterwakilan dan legalitas partisipasi; apresiasi terhadap APRIL yang siap untuk terbuka terhadap perbaikan; tantangannya adalah implementasi, terutama penerimaan masyarakat; apakah restorasi harus seperti semula, masih dapat diperdebatkan; setiap penilai dapat memiliki pemahaman yang berbeda mengenai permasalahan; hasil penilai perlu dikonsultasikan dan disepakati bersama; memastikan restorasi hak-hak dan kesepakatan. Penilai independen tidak dapat melakukan diskusi hanya satu kali.
- » Pemahaman tentang perbaikan ini harus sama; Pengalaman-pengalaman ini menciptakan metodologi perbaikan; lebih menekankan pada pendekatan perbaikan; pendampingan harus diberikan; memastikan bahwa subjek dan objek harus jelas sebagai perbaikan individu, kelompok dan desa.

<p>Pertanyaan #1: Berdasarkan presentasi pagi ini, apa yang dipelajari? Serta hal-hal apa yang menjadi perhatian dan pertanyaan bagi Anda?</p>	<ul style="list-style-type: none"> » Pemahaman mengenai perbaikan berbeda; masyarakat adat belajar, masyarakat belajar mengenai kerangka kerja perbaikan melalui komik » Pemahaman mengenai perbaikan bercampur aduk antara standar FSC, kerangka kerja perbaikan, PADIATAPA, masyarakat adat, masyarakat lokal, dan sistem sosial desa seperti struktur kerajaan dan adat. Jika Anda mencampuradukkannya, Anda akan mengulangi kesalahan dari pengalaman masa lalu. Ada pendampingan dan pemberdayaan masyarakat, dipertahankan dan ditransformasikan; Peserta yang terlibat dapat saling melengkapi dalam kerangka kerja perbaikan, sebagai contoh, para ahli teori dapat membantu dengan praktik, pengembangan kapasitas untuk memfasilitasi pemetaan, konflik, dan negosiasi. » Pemahaman masyarakat yang terkena dampak, keterbatasan pengetahuan tentang kerangka kerja perbaikan di kalangan masyarakat. Apakah hasil ini digunakan untuk merevisi dokumen kerangka kerja perbaikan atau hanya untuk catatan; Sebagian besar pekerjaan penilai independen dilakukan dengan tinjauan pustaka, apakah konsultasi dilakukan/metodologi seperti apa karena ada begitu banyak desa » Ambang batas ketika kondisi sosial dan lingkungan cocok untuk maju menuju sertifikasi harus jelas. bagaimana lembaga dapat ditugaskan sebagai penilai atau verifikator independen; Bagaimana proses kerangka kerja perbaikan ini diselaraskan dengan kebijakan pemerintah?
<p>Pertanyaan #2: Apa yang ingin anda lihat sebagai hasil dari proses perbaikan ini?</p>	<ul style="list-style-type: none"> » Luas HTI dan restorasi tidak bertambah dan ada konsekuensi terhadap lahan yang direstorasi, 7,7 juta ha yang harus direstorasi; tutupan hutan dapat meningkat dan target pengurangan emisi; konflik sosial ada di setiap lokasi dan Kerangka Kerja Perbaikan berguna untuk menyelesaikannya; Kerangka Kerja Perbaikan mengubah pola BAU (business as usual) » Kerangka Kerja Perbaikan dapat menjadi solusi yang saling menguntungkan; Kerangka Kerja Perbaikan untuk lahan restorasi tidak akan menjadi masalah di masa depan. » Perbaikan hak-hak sosial, terutama mengembalikan hak-hak tradisional untuk mencari nafkah seperti sebelumnya, akses ke sungai dan lahan untuk pangan, perusahaan harus bertanggung jawab atas budidaya yang mereka lakukan; Kelembagaan tradisional yang rusak harus diperkuat; ekonomi masyarakat dapat berpartisipasi dalam hutan regeneratif; Situs-situs budaya dapat diurus kembali. » Kerangka Kerja Perbaikan ibarat peta jalan, bisa menjadi jalan akhir bagi hutan dan masyarakat » Tidak ada deforestasi hutan alam, harmonisasi hubungan baik antara masyarakat dan perusahaan, campur tangan pemerintah untuk terlibat dalam meningkatkan harmonisasi, hutan alam di dalam konsesi dilindungi dan dikelola oleh masyarakat dan perusahaan » Lokasi restorasi di kawasan konservasi dan restorasi. Berapa banyak area perhutanan sosial baru yang dapat dikembangkan? Salah satu cara untuk meningkatkan restorasi adalah melalui perhutanan sosial. Apakah Kerangka Kerja Perbaikan untuk sosial sudah cukup untuk dijadikan Kerangka Kerja Perbaikan nasional, memerlukan panduan teknis, terutama bagi para penilai.

<p>Pertanyaan #2: Apa yang ingin anda lihat sebagai hasil dari proses perbaikan ini?</p>	<ul style="list-style-type: none"> » Harapan untuk perbaikan lingkungan dan sosial. Bagaimana harapan itu diwujudkan dan perlu ada negosiasi dalam memahami masalah. Penilai Independen memiliki pemahaman yang sama tentang masyarakat adat dan perlu proses yang panjang dan bagaimana menyelesaikannya di awal. Harapan lingkungan, grafik tutupan hutan yang meningkat dan deforestasi yang menurun dan diadopsi oleh perusahaan. Diharapkan dapat memenuhi target pemerintah. Penguatan kapasitas masyarakat pengelola Perhutanan Sosial (PS) diperlukan, kurangnya sumber daya pendampingan. Perbaikan berfokus pada Perhutanan Sosial. » Mengikat semangat dan komitmen untuk menjaga martabat Indonesia agar memiliki visi yang sama. Pemegang izin memiliki mandat untuk mengelolanya dan pemerintah memiliki mandat untuk menjaganya. Mewujudkan pengelolaan hutan lestari. Keharmonisan antar pihak untuk menjaga kehormatan bangsa.
<p>Pertanyaan #3: Apa yang diperlukan agar hasil-hasil tersebut terjadi?</p>	<ul style="list-style-type: none"> » Komunikasi diperlukan. » Siapa yang akan menanggung biaya, siapa yang akan memfasilitasi proses perbaikan, termasuk pendampingan » Kolaborasi, adaptif, berpikiran terbuka, transparan » Dialog untuk menyamakan persepsi dan solusi yang saling menguntungkan; penyelarasan antara FSC, kebijakan pemerintah dan kearifan lokal; sinergi bersama dalam PHL » Kepercayaan, namun tidak mudah dibangun. Diuji melalui kolaborasi bersama » Menciptakan prasyarat seperti berkolaborasi dengan pemerintah. FSC dianggap sebagai pesaing dan FSC menyiapkan kertas posisi dari perspektif Indonesia. Insentif apa yang diusulkan bagi perusahaan untuk mendukung target pemerintah? » Masyarakat harus mengetahui perkembangan dalam Kerangka Kerja Perbaikan » Kerangka kerja yang jelas yang mengakomodasi semua pihak, kerangka kerja yang berbeda untuk masyarakat tradisional dan lokal, harus dirancang bersama.

Catatan lain atau rekomendasi:

Pemerintah harus memberikan insentif kepada para pihak yang memperbaiki lingkungan dan sosial; bentuk apresiasi FSC kepada pihak yg berkomitmen dalam rencana kerja perbaikan

Refleksi tambahan dari fasilitator dan rapporteur:

